

Ilmu Sosial

**LAPORAN PENELITIAN HIBAH BERSAING
TAHUN ANGGARAN 2011**



**KEKERASAN MAHASISWA DI KOTA MAKASSAR
Studi Eksploratif Anatomi Kekerasan**

Peneliti :

**Prof. Dr. Kacung Marijan, M.A.
Hari Fitrianto, S.IP.**

Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional,
Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Bersaing
Nomor : 004/SP2H/PL/Dit.Litabmas/IV/2011, tanggal 14 April 2011

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2011

B. Lembar Identitas dan Pengesahan

1. Judul : **KEKERASAN MAHASISWA DI KOTA MAKASSAR**
Studi Eksploratif Anatomi Kekerasan

2. Ketua Peneliti

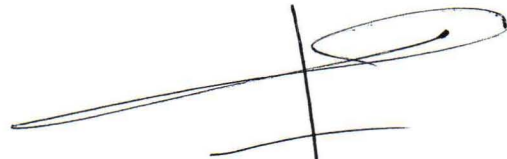
- a. Nama Lengkap : Prof. Dr. Kacung Marijan, MA.
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. NIP : 196403251989031002
- d. Jabatan Struktural : Pembina Muda/IV c
- e. Jabatan Fungsional : Guru Besar
- f. Unit Kerja : FISIP/ Ilmu Politik
- g. Alamat Surat : Fisip Unair Jalan Dharmawangsa Dalam,
- h. Telp/Fax : Tlp (031) 5034015/Fax (031) 5012442
- i. Telp/e-mail : (031) 8536932/
- k. Tim Peneliti

No	Nama	Bidang Keahlian	Institusi	Curahan waktu Jam/Minggu
1	Hari Fitrianto, S.IP	Pemerintahan dan Gerakan Sosial Politik	Universitas Airlangga	15

3. Pendanaan dan Jangka Waktu Penelitian

- a. Jangka waktu penelitian yang diusulkan : 1 (satu) tahun
- b. Biaya yang diusulkan : Rp. 49.955.000,-
- c. Biaya yang disetujui : Rp. 49.955.000,-

Surabaya, 9 November 2011
 Ketua Peneliti,



Prof. Kacung Marijan, MA., Ph.D.
 NIP. 196403251989031003

Mengetahui,
 Dekan Fisip Unair



Dis. Basis Susilo, M.A
 NIP. 195408081981031007



Mengetahui
 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM)
 Universitas Airlangga

Dr. Djoko Agus Purwanto, Apt., M.Si.
 NIP. 195908051987011001

RINGKASAN EKSEKUTIF

KEKERASAN MAHASISWA DI KOTA MAKASSAR
Studi Eksploratif Anatomi Kekerasan¹

Oleh:

Prof. Kacung Marijan² dan Hari Fitrianto³

Kekerasan mahasiswa di Kota Makassar terbilang tinggi dibanding dengan kota-kota lain di Indonesia. Kondisi ini memberikan dampak yang sangat memprihatinkan tidak hanya dilihat dalam konteks kekinian tetapi juga jangka panjang mengingat mahasiswa selalu diproyeksikan untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Kerumitan dan kedalaman persoalan kekerasan mahasiswa di Kota Makassar hanya dapat diurai dengan cara seksama dan menyeluruh sehingga solusi-solusi kebijakan pendidikan yang lebih memungkinkan dan efektif dapat ditawarkan kepada stakeholder pendidikan di Kota Makassar. Namun demikian kajian-kajian tentang kekerasan mahasiswa di Kota Makassar masih terbatas dan relatif dangkal. Hal ini disebabkan karena perspektif yang digunakan cenderung tunggal dan hasil kajiannya pun belum mampu beranjak hingga memberikan advokasi terhadap kebijakan pendidikan di Kota Makassar. Studi ini mencoba membaca anatomi kekerasan mahasiswa melalui pendeskripsian mendalam (*thick description*). Untuk itu perspektif yang digunakan pun tidak hanya dari sisi korban kekerasan melainkan juga perspektif pelaku dan penonton kekerasan. Analisa kekerasan dengan cara multi-perspektif ini akan menghasilkan gambaran tentang pola-pola dan sumber-sumber justifikasi kekerasan secara lebih utuh.

Untuk memahami kekerasan mahasiswa, peneliti memberikan batasan terhadap definisi apa yang dimaksud dengan kekerasan mahasiswa, karena pada prakteknya kekerasan mahasiswa ini memiliki bentuk yang beragam dan bervariasi, beragam pula motif maupun kelompok mahasiswa yang terlibat. Penelitian ini mencoba untuk memberikan pilahan terhadap apa yang dimaksud dengan kekerasan mahasiswa tersebut dengan didasarkan pada motifnya. Kekerasan mahasiswa yang pertama adalah kekerasan yang dimaknai sebagai kekerasan *an sich* (*just violence*). Tipologi kekerasan yang kedua adalah kekerasan aksi mahasiswa (*unjust violence*).

¹ Penelitian dibiayai melalui hibah Bersaing, tahun anggaran 2011, dengan anggaran Rp.49.955.000

² Guru Besar Departemen Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.

³ Dosen Departemen Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.

Secara umum penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan kebijakan pendidikan di Kota Makassar untuk menghentikan kekerasan mahasiswa di Kota Makassar. Rumusan rekomendasi ini dicapai melalui tujuan khusus berikut ini:

- a. Memetakan pola-pola kekerasan yang melibatkan mahasiswa di Kota Makassar
- b. Mengidentifikasi sumber-sumber referensi yang menjustifikasi tindakan kekerasan mahasiswa di Kota Makassar
- c. Mengurai relasi antara pola-pola kekerasan mahasiswa dengan sumber-sumber referensi yang menjustifikasi tindakan kekerasan mahasiswa di Kota Makassar.

Dengan tiga tujuan khusus tersebut maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan tidak hanya sekedar gambaran maupun deskripsi tentang kekerasan mahasiswa yang terjadi di Makassar, melainkan penelitian ini juga mampu mengungkap anatomi kekerasan mahasiswa di Makassar. Dengan terungkapnya anatomi kekerasan mahasiswa, maka penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan pembuat kebijakan. Tidak berlebihan jika peneliti memiliki harapan seperti tersebut, mengingat penelitian terkait yang selama ini ada belum mampu untuk mengurai anatomi kekerasan itu sendiri, terlebih pada kasus yang spesifik yakni kekerasan mahasiswa.

Tetapi penting untuk diingat, penelitian ini memiliki keterbatasan generalisasi terhadap kekerasan mahasiswa, karena penelitian ini hanya spesifik menjelaskan dan memahami kasus di Kota Makassar. Hal ini didasarkan pada asumsi kami terhadap hubungan yang sangat erat antara konteks dengan anatomi kekerasan. Setiap kasus kekerasan, anatominya sangat ditentukan oleh tempat (konteks) praktek kekerasan itu terjadi. Untuk itu, kami menyarankan jika akan dirumuskan kebijakan yang sifatnya mengikat secara nasional, penting dilakukan penelitian-penelitian lain dalam membuat kebijakan nir kekerasan di wilayah lain di Indonesia.

I. Inovasi Ipteks

Penelitian ini tidak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan pembaruan dan pengembangan teknologi akan tetapi sangat bertalian erat dengan pembaruan dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam kajian konflik-kekerasan mahasiswa. Kontribusi yang diberikan oleh penelitian ini setidaknya berkaitan dengan dua hal. Pertama, penggunaan pendekatan multi-perspektif dalam merumuskan kebijakan untuk menghentikan

kekerasan mahasiswa. Kedua, memformulasikan pendidikan perdamaian dalam model kebijakan pendidikan nir-kekerasan di Kota Makassar. Perspektif pendidikan perdamaian (*peace education*) dalam kebijakan pendidikan relatif baru di Indonesia untuk itu dengan menghadirkan perspektif ini dalam tawaran model kebijakan pendidikan di Kota Makassar, tentunya akan memberikan suntikan baru bagi pengembangan kajian konflik dan kekerasan di Indonesia.

Sehubungan bahwa kasus kekerasan mahasiswa tidak hanya eksklusif terjadi di Kota Makassar, maka kebutuhan untuk melakukan kajian serupa di daerah-daerah yang sering terjadi kekerasan relatif sangat diperlukan. Dengan menggunakan metode yang sama perluasan cakupan penelitian dapat dilakukan. Namun yang perlu diperhatikan adalah keragaman konteks sosial-budaya di setiap daerah menyebabkan kecenderungan perbedaan sentuhan model kebijakan pendidikan.

II. Kontribusi Terhadap Pembangunan

Dari sudut pandang manapun tindakan kekerasan tidak dapat diterima terlebih jika aktor pelaku kekerasan tidak memiliki keabsahan dalam melakukan kekerasan. Salah satu problematika pembangunan di Indonesia adalah hadirnya kekerasan sebagai bagian dari proses pembangunan. Kekerasan dalam proses pembangunan tidak hanya hadir dalam wajah kekerasan fisik tetapi juga kekerasan struktural (*structural violence*). Kekerasan struktural umumnya dilakukan oleh pemilik kekuasaan atau kewenangan dalam hal ini negara atau pemerintah. Umumnya bentuk dari kekerasan struktural adalah kebijakan yang membatasi warga negara dalam memperoleh atau mendapatkan hak-haknya.

Idealnya kebijakan pembangunan memberikan persamaan kepada seluruh warga negara untuk beraktivitas mengeluarkan segala potensi diri dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dalam kebijakan pembangunan tidak ada satupun warga negara yang tidak dilibatkan dan tidak mendapatkan keuntungan dalam proses pembangunan. Jika hal ini tidak diwujudkan maka potensi terjadinya perlawanan sosial (*social resistance*) dan pembangkangan sosial (*social disobedience*) sebagai bentuk dari upaya warga negara untuk mengejar keadilan akan sangat besar. Lebih jauh, gejala-gejala tersebut justru berakibat kontra-produktif bagi capaian-capaian kebijakan pembangunan itu sendiri. Kajian ini berkontribusi dalam porsi tertentu bagi upaya untuk memahami sekaligus mengantisipasi merebaknya perlawanan dan pembangkangan masyarakat.

III. Manfaat Bagi Institusi

Sedari awal, desain penelitian ini melibatkan berbagai institusi dalam perumusan permasalahan, pelaksanaan penelitian, hingga perumusan rekomendasi. Kesadaran untuk melibatkan beragam institusi didasarkan kepada argumentasi bahwa persoalan kekerasan mahasiswa khususnya dan kebijakan pendidikan perguruan tinggi umumnya bukan eksklusif milik peneliti semata melainkan juga *stakeholder* pendidikan di Indonesia (Kota Makassar). Untuk itu kami secara intens bekerjasama dengan Dirjen Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional, Perguruan Tinggi di Kota Makassar, mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan intra dan ekstra kampus, pemerintah Kota Makassar, dan Kepolisian.

Secara singkat kontribusi para pihak dalam penelitian akan dijelaskan sebagai berikut. Dirjen Dikti memberikan lanskap persoalan dan kebijakan yang telah dibuat. Lanskap persoalan dan kebijakan ini sangat berguna dalam membuat peta masalah kekerasan mahasiswa di Kota Makassar. Perguruan tinggi di Kota Makassar, seperti: Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Negeri Makassar (UMN), Universitas 45 Makassar, Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar, Universitas Islam Muhammadiyah (Unismu), dan Universitas Muslim Indonesia (UMI) menjadi narasumber, memberikan data, dan pemikiran-pemikiran mereka dalam menyelesaikan persoalan kekerasan mahasiswa di Kota Makassar. Mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan membantu penelitian dalam menjadi narasumber, menyuplai data dan terlibat langsung sebagai asisten peneliti. Pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini DPRD Kota Makassar, memberikan pandangan tentang hubungan antara kekerasan mahasiswa dan politik praktis Kota Makassar dan menawarkan solusi untuk menyelesaikan kekerasan mahasiswa. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan telah menyediakan data intelejen dan pandang-pandangannya tentang kekerasan mahasiswa di Kota Makassar.

Anggota tim peneliti dalam penelitian ini merupakan kolaborasi antara peneliti dari Universitas Airlangga Surabaya dengan Universitas Hasanuddin Makassar. Pelibatan peneliti dari Universitas Hasanuddin merupakan kekuatan terutama dalam memahami persoalan dan aksesibilitas kepada narasumber. Sementara, peneliti dari Universitas Airlangga memberikan kekuatan terhadap kejernihan dalam proses identifikasi dan rekomendasi permasalahan karena adanya keterjarakan antara peneliti dengan yang diteliti.

IV. Publikasi Ilmiah

Hasil penelitian ini sedianya akan dilaporkan kepada Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional dalam bentuk *policy paper*. Selain itu, kami juga akan mempublikasi hasil laporan penelitian ini dalam bentuk tulisan jurnal dan mempresentasikan dalam kegiatan seminar nasional.

PRAKATA

Kekerasan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah manusia. Penghentian kekerasan dalam kehidupan manusia merupakan tantangan sangat berat dalam mewujudkan masyarakat beradab. Demikian halnya dengan kekerasan mahasiswa di berbagai daerah Indonesia yang kian merebak merupakan agenda yang harus dilakukan bersama. Ide dan penyelenggaraan penelitian ini merupakan bentuk kegelisahan para peneliti di Departemen Politik, FISIP, Universitas Airlangga terhadap fenomena kekerasan mahasiswa di Indonesia, terutama di Kota Makassar.

Laporan penelitian yang ada dihadapan Anda merupakan salah satu dari empat penelitian yang memiliki tema besar tentang kekerasan mahasiswa di Kota Makassar. Tiga penelitian lainnya adalah “Konstruksi Sosial Kekerasan Mahasiswa di Kota Makassar”, “Analisa Kultural-Politik Kekerasan Mahasiswa di Kota Makassar”, dan “Model Kebijakan Nir Kekerasan Di Makassar”. Sebagai sebuah kesatuan, laporan penelitian ini akan lebih dipahami jika terlebih dahulu membaca dua penelitian lainnya yakni; “Konstruksi Sosial Kekerasan Mahasiswa di Kota Makassar”, “Analisa Kultural-Politik Kekerasan Mahasiswa di Kota Makassar”.

Ucapan terima kasih pertama-pertama kami haturkan kepada Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional yang telah berkenan memfasilitasi penyelenggaraan penelitian ini melalui skema Hibah Bersaing. Selanjutnya kepada LPPM Universitas Airlangga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, dan Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga. Ketiga lembaga ini memberikan fasilitas dan kemudahan dalam penelitian kami. Selain itu, penghargaan tidak terhingga kepada para narasumber kami di pelbagai perguruan tinggi di Kota Makassar, DPRD Kota Makassar, dan Pemerintah Kota Makassar. Terakhir, ucapan terima kasih kepada rekan-rekan peneliti di Universitas Airlangga dan Universitas Hasanuddin.

Daftar Isi

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
Ringkasan	iii
Prakata	iv
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel dan Gambar	x
Bab I. Pendahuluan	1
Bab II. Studi Pustaka	5
Bab III. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
Bab IV. Metode Penelitian	16
Bab V. Hasil dan Pembahasan	20
Bab VI. Kesimpulan dan Saran	65
Daftar Pustaka	
Lampiran	

Daftar Tabel, Grafik dan Gambar

- Tabel 1 : Definisi Kekerasan
- Tabel 2 : Frekuensi Tawuran Mahasiswa di Makassar
-
- Grafik 1 : Frekuensi Kekerasan Mahasiswa di Kota Makassar
- Grafik 2 : Frekuensi Kekerasan berdasarkan Universitas
- Grafik 3 : Frekuensi kekerasan Berdasarkan Fakultas di UNM
- Grafik 4 : Frekuensi kekerasan Berdasarkan Fakultas di UNHAS
-
- Gambar 1 : Anatomi Kekerasan Mahasiswa
- Gambar 2 : Alur Penelitian
- Gambar 3 : Peta Kerajaan Gowa
- Gambar 4 : Kekerasan Mahasiswa dan Kekerasan Aksi Mahasiswa
- Gambar 3 : Senjata yang Digunakan Oleh Mahasiswa Dalam Tawuran
- Gambar 4 : Bentrokan Mahasiswa dan Aparat Kepolisian

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Studi ini dimaksudkan untuk memahami dan menjelaskan kekerasan yang melibatkan mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Secara lebih spesifik, yang menjadi fokus dari studi ini adalah pola-pola kekerasan yang melibatkan mahasiswa, sumber-sumber referensi yang menjadi pembeda bagi tindakan kekerasan, hubungan antara pola-pola kekerasan mahasiswa dengan sumber-sumber referensi yang menjadi pembeda tindakan kekerasan, dan peran para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan untuk mengatasi kekerasan mahasiswa.

Adanya kekerasan di dalam gerakan-gerakan mahasiswa sebenarnya bukan khas mahasiswa di Kota Makassar. Adanya kekerasan juga ditemukan di dalam aksi-aksi gerakan mahasiswa di berbagai negara, termasuk di berbagai kota di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari fakta bahwa aksi-aksi itu acapkali tidak hanya berlangsung secara damai, melainkan juga berlangsung dalam suasana tegang dan penuh kekerasan. Aksi kekerasan itu biasanya melibatkan perlawanan yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap penguasa. Di dalam mengatasi ketidakpuasan itu, penguasa melibatkan aparaturnya, khususnya aparat keamanan seperti polisi, yang memiliki instrumen di dalam melakukan penekanan seperti gas air mata dan senjata. Sementara itu, di dalam mendesak tuntutan-tuntutannya, para mahasiswa juga menggunakan sejumlah instrumen kekerasan sebagai bentuk kapitalisasi tuntutan agar lebih menarik perhatian dan pada akhirnya tuntutan mereka bisa dikabulkan. Manakala tidak terdapat titik temu antara kepentingan mahasiswa dengan kepentingan aparat keamanan, aksi kekerasan yang lebih besar acapkali tidak bisa dihindarkan. Di Makassar, misalnya, dijumpai polisi yang masuk kampus, mengejar mahasiswa yang melakukan aksi. Sebaliknya, para mahasiswa melakukan perlawanan. Sehingga, bentrok fisik antara mahasiswa dengan aparat keamanan menjadi tidak dapat dihindari.

Memang, tidak setiap waktu mahasiswa melakukan gerakan dan berbuntut pada munculnya aksi kekerasan. Tetapi, kalau kita cermati pertumbuhan kasus kekerasan mahasiswa sudah sangat mengkhawatirkan karena dampaknya tidak hanya dirasakan saat ini tetapi masa yang akan datang. Kekerasan dan vandalisme yang melibatkan mahasiswa di berbagai tempat di Indonesia telah menyebabkan korban jiwa dan kerugian ekonomi karena rusaknya berbagai fasilitas umum maupun kampus. Lebih dari itu, dampak kekerasan yang lebih mengkhawatirkan adalah yang bersifat *intangibile*. Kekerasan yang digunakan sebagai metode/alat untuk mendramatisasikan tuntutan-tuntutan (*instrumental*) maupun penegasan identitas (*constitutive*) telah terinternalisasi dalam perilaku keseharian mahasiswa. Ini semakin berbahaya mengingat mahasiswa hanyalah satu dari beragam identitas (*multi-identity*) yang tersematkan pada setiap subjek. Setiap subjek memiliki identitas sebagai mahasiswa, pemuda, pemeluk agama tertentu, anggota etnis, anggota organisasi, anggota keluarga, dan seterusnya. Mahasiswa diproyeksikan untuk menjadi kandidat-kandidat pemimpin masa depan. Jika kekerasan telah terinternalisasi maka dapat berimbas pada karakter pemimpin masa depan bangsa Indonesia. Tidak tertutup kemungkinan, pemimpin-pemimpin yang memiliki karakter demikian juga akan menggunakan kekerasan sebagai instrumen untuk melakukan kekerasan ketika menangani masalah-masalah yang sulit untuk dihadapi atau ketika menghadapi tuntutan-tuntutan dari rakyatnya.

Masalah kekerasan mahasiswa semakin pelik untuk dicarikan jalan keluar semenjak belum terdapat kajian yang serius dan cukup komprehensif memetakan kekerasan mahasiswa di daerah yang spesifik. Kajian dan data base kekerasan mahasiswa yang tersedia di Indonesia sangat terbatas. Data base umum tentang kekerasan kolektif pernah dilakukan oleh Varshney, Panggabean, dan Tadjoeeddin (2004) dengan judul 'Pola-pola Kekerasan Kolektif di Indonesia (1990-2003)'. Data mereka hanya menunjukkan bahwa hampir 40 persen kekerasan komunal yang terjadi di Indonesia dipicu oleh perkelahan pemuda. Deskripsi ini masih sangat terbatas dan samar untuk mengetahui pola-pola kekerasan mahasiswa di daerah tertentu. Oleh karena itu data kekerasan kelompok yang

spesifik mahasiswa dan daerah tertentu sangat diperlukan untuk memberikan deskripsi anatomi kekerasan mahasiswa di setiap daerah dan bagaimana cara penanganannya.

Kekerasan mahasiswa jelas bukanlah kasus eksklusif di Kota Makassar melainkan terjadi hampir diberbagai daerah di Indonesia. Meskipun demikian, intensitas kekerasan mahasiswa yang terjadi di Kota Makassar tergolong tinggi kalau dibandingkan dengan yang terjadi kota-kota lain di Indonesia. Selain itu, di kota-kota lain, kekerasan mahasiswa itu biasanya lebih berdimensi vertikal, yakni antara mahasiswa yang tidak puas terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti kebijakan mengenai kenaikan BBM, kenaikan biaya angkutan umum, penanganan kasus-kasus korupsi, dan kebijakan-kebijakan lainnya. Manakala di dalam menghadapi tuntutan demikian, penguasa, misalnya, lebih menggunakan aparat keamanan yang lebih merepresentasikan kepentingan penguasa, kekerasan-kekerasan acapkali tidak bisa dielakkan. Kekerasan berpola demikian juga terjadi di Makassar. Tetapi, di Makassar kekerasan juga berdimensi horizontal, yaitu kekerasan sesama mahasiswa. Di Universitas Hasanuddin, misalnya, kekerasan berdimensi horizontal itu acapkali terjadi antara mahasiswa Fakultas Teknik dengan mahasiswa FISIP, atau antara mahasiswa Fakultas Teknik dengan mahasiswa dari fakultas-fakultas lain. Di Universitas Negeri Makassar, kekerasan acapkali terjadi antara mahasiswa Fakultas Teknik dengan mahasiswa Fakultas Sastra dan Seni, atau antara mahasiswa Fakultas Teknik dengan mahasiswa fakultas-fakultas lain. Kekerasan antar mahasiswa juga terjadi antara mahasiswa yang berlatar belakang daerah tertentu dengan mahasiswa yang berasal dari daerah lainnya.

Asumsi tentang mengapa kekerasan mahasiswa sering terjadi di Kota Makassar bisa didekati dengan beragam perspektif salah satunya perspektif spasial. Kota Makassar adalah kota terbesar di wilayah timur Indonesia. Selain sebagai pusat pertumbuhan perekonomian di Indonesia Timur, Makassar secara simulatan menyuplai elit-elit politik di tingkat nasional. Keberadaan elit-elit ini dipentas politik nasional seringkali diidentikan sebagai representasi masyarakat Indonesia Timur. Munculnya Jusuf Kalla sebagai wakil presiden periode 2004-2009 acapkali tidak hanya disebut sebagai representasi dari Kota Makassar, melainkan juga dari Indonesia Timur, bahkan luar Jawa.

Pertumbuhan kota dengan dukungan ketersediaan infrastruktur yang lebih baik turut menjadikan Makassar sebagai tempat bertemunya penduduk dari berbagai wilayah di Indonesia Timur. Keberadaan infrastuktur pendidikan yang lebih baik, misalnya, mendorong pemuda-pemuda yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia Timur untuk menimba ilmu di Kota Makassar. Dengan demikian, berkumpulnya penduduk untuk kepentingan ekonomi, politik, dan pendidikan di kota ini menyebabkan Makassar menjelma menjadi kota dengan tingkat keberagaman, interaksi, dan kompetisi yang paling tinggi di Indonesia Timur.

Studi ini, dengan demikian, menjadi penting untuk memetakan pola konflik kekerasan yang melibatkan mahasiswa, dan bagaimana mengatasinya. Bagaimanapun juga sering munculnya kekerasan yang melibatkan mahasiswa di Kota Makassar membuat Kota Makassar yang merupakan pintu utama kegiatan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur, telah membuat stabilitas masyarakat di daerah ini terkesan kurang terjaga. Padahal, adanya stabilitas di dalam masyarakat merupakan salah satu iklim daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya, dan menjadi penopang beragam kegiatan ekonomi. Selain itu, mahasiswa yang merupakan salah satu sumber rekrutmen kepemimpinan di masa depan, menjadi tersosialisasi dengan model-model penyelesaian dengan cara kekerasan. Padahal, penyelesaikan masalah secara damai itu lebih baik. Studi ini, dengan demikian, menjadi penting sebagai titik tolak di dalam membuat kebijakan-kebijakan atau mendorong berkurangnya aksi kekerasan yang melibatkan mahasiswa. Kalaupun aksi mahasiswa itu dipandang sebagai aktualisasi dari penyaluran aspirasi di dalam masyarakat yang demokratis, yang penting adalah bagaimanakah mendorong aksi-aksi itu berlangsung secara damai. Dengan demikian, aksi itu tidak mengarah pada aksi kekerasan yang akan merugikan mahasiswaitu sendiri, masyarakat dan daerah.

I.2. Perumusan Masalah

Adapun Yang menjadi permasalahan pokok di dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan kekerasan yang melibatkan mahasiswa di Kota Makassar. Secara lebih spesifik, permasalahan yang hendak dijawab adalah:

- a. Bagaimana pola-pola kekerasan yang melibatkan mahasiswa di Kota Makassar?
- b. Apa yang menjadi sumber-sumber referensi yang menjustifikasi tindakan kekerasan mahasiswa di Kota Makassar?
- c. Bagaimana hubungan antara pola-pola kekerasan mahasiswa dengan sumber-sumber referensi yang menjustifikasi tindakan kekerasan mahasiswa di Kota Makassar?

BAB II

STUDI PUSTAKA

II.2. Memahami Kekerasan

Secara sederhana, John Martin Rich (1981:65) membatasi kekerasan sebagai ‘*a sudden and extremely forceful act which causes physical harm or suffering to persons*’. Tetapi, secara empirik maupun teoritis, tidak sesederhana itu. Pertanyaan pokoknya adalah bukan sekadar apakah itu kekerasan, melainkan juga pada tindakan apa sajakah yang masuk dalam katagori kekerasan. Kekerasan dalam realitasnya dapat dimaknai secara berbeda-beda antara korban (*victim*) dan pelaku (*perpetrator*). Belum lagi ketika definisi kekerasan diperhadapkan dengan tindakan-tindakan aparatus negara yang memiliki legitimasi atas penggunaan kekerasan. Pada masyarakat multikultur, kerumitan definisi kekerasan akan semakin bertambah tatkala kekerasan dimaknai secara berbeda-beda dari kacamata nilai dan norma adat tertentu. Misalnya, pemerhati (*audience*) menemukan dalam masyarakat tindakan seperti memukul, mencambuk, atau bahkan membunuh dalam rangka menegakan nilai-nilai adat tertentu dapat dibenarkan. Jika demikian, mendefinisikan kekerasan menjadi penting untuk memberikan batasan-batasan apakah definisi kekerasan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Eller (2006: 5-13) menawarkan enam indikator yang dapat digunakan untuk membuat batasan-batasan (mendefinisikan) kekerasan, yaitu kekuatan, maksud, *personhood*, rasionalitas/irrasionalitas, legitimasi, dan perspektif.

Kekuatan. Definisi sempit kekerasan diasosiasikan dengan penggunaan kekuatan fisik (*physical force*). Ini dapat terjadi melalui penggunaan kekuatan fisik (aktif) seperti yang terjadi pada kejahatan-kejahatan jalanan maupun kekuatan ancaman fisik (secara pasif) seperti kejahatan-kejahatan kerah putih. Definisi kekerasan menjadi lebih luas jika memasukan penggunaan kekuatan untuk membatasi pilihan sehingga menyebabkan seseorang berada pada posisi tidak mengenakan atau biasa disebut sebagai kekerasan struktural (*structural violence*). Ini sejalan dengan Johan Galtung yang mengatagorikan

kekerasan menjadi dua, yaitu kekerasan personal (*personal violence*) yang didalamnya terdapat kekerasan fisik dan psikologis dengan kekerasan struktural.

Maksud. Dalam sistem hukum dan kehidupan sehari-hari, seseorang dianggap melakukan kekerasan jika dia bermaksud melakukannya. Persoalannya kemudian adalah tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang justru diakibatkan oleh situasi di luar terkontrolnya atau dipaksa oleh orang lain untuk melakukannya. Seperti seorang wanita memukul pria yang tengah mencoba memperkosanya atau seorang dokter bedah yang mengamputasi kaki pasiennya agar pembusukan tidak menjalar keseluruh tubuh. Situasi ini menjadi wilayah abu-abu untuk mendefinisikan apakah tindakan tersebut termasuk dalam katagori kekerasan atau bukan.

Personhood. Sebuah tindakan hanya mungkin dikatakan kekerasan apabila pelaku dan korbannya adalah sama-sama manusia. Definisi ini membatasi tindakan-tindakan yang salah satu pelaku atau korbannya bukan manusia, seperti memukul kucing yang telah mencuri ikan di meja makan atau seorang anak kecil sedang berkumur antiseptik untuk membunuh kuman-kuman yang ada dimulutnya. Seperti dikatakan oleh Keane (2004:36), *...violence is always 'embodied'. The embodied quality of violence helps us to understand why the blocking off of a highway by chanting demonstrators who lie down on the pavement is not an act of violence.* Jika kekerasan selalu berhubungan dengan (tubuh) manusia sebagai sasaran untuk disakiti, dilukai, atau bahkan dibunuh, maka bentuk-bentuk kekerasan yang tidak berhubungan dengannya dikategorikan bukan kekerasan, seperti pengerusakan (*vandalist*).

Rasionalitas/irrasionalitas. Banyak yang memahami kalau kekerasan adalah tindakan irrasional atau tindakan di bawah pengaruh kekuatan jahat/setan yang hanya dilakukan oleh "orang jahat". Pemahaman ini menciptakan dikotomi yang absurd antara orang baik dan orang jahat. Padahal kondisi-kondisi tertentu dapat saja mendorong seorang baik berubah menjadi orang jahat. Setidaknya hal ini terungkap dalam studi Arendt (1969) tentang kekerasan Perang Dunia II dan Pasca Perang Dunia II.

Legitimasi. Persoalan dari keabsahan kekerasan berakar pada “relativitas” kekerasan. Relativitas kekerasan bukan menunjuk pada kejadian kekerasan seseorang terhadap orang lain melainkan pada konteks sosial spesifik seperti apa tindakan itu terjadi, seperti seorang petinju profesional memukul lawannya pada saat pertandingan adalah kekerasan yang absah (*legitimate violence*). Kejadian pada konteks sosial spesifik juga mempertimbangkan keberadaan ruang dan waktu. Saat ini memasung seseorang karena alasan kegilaan adalah tindakan kekerasan, tetapi penilaian ini akan berbeda jika kita hidup dua abad lalu atau “kawin lari” adalah tindakan kita dianggap salah tetapi oleh masyarakat lain dianggap normal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perilaku menyimpang bersifat relatif ketika didudukan dalam konteks sosial yang spesifik. Ini sejalan dengan Schmidt and Schroder (2001:18-19) yang mengatakan “violence is performed as well as imagined by reflexive, socially positioned human beings under specific historical conditions for concrete reasons”.

Lebih jauh lagi dalam konteks kekerasan politik (*political violence*) hubungan kekuasaan (*power*) dengan kekerasan (*violence*) selalu berpungguan. Kekerasan pada dasarnya adalah tidak absah (*illegitimate*), kekerasan selalu menjadi alat yang digunakan oleh para penguasa pada saat mereka kehilangan atau tidak memiliki kekuasaan yang absah (Arendt, 1969).

Perspektif. Dalam setiap tindakan kekerasan paling tidak terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pelaku dan korban dan keduanya memiliki persepsi yang berbeda terhadap kejadian kekerasan. Dalam pendekatan kekerasan konvensional, sebagai penonton (*audience*) akan segera berempati dengan kondisi yang dialami oleh korban dan di sisi lain menganggap tindakan pelaku adalah tidak benar sehingga patut dipersalahkan tanpa terlebih dahulu memberikan penilaian memadai terhadap argumentasi-argumentasi pelaku. Episode kekerasan layaknya sebuah “pementasan” yang melibatkan aktor dan perannya. Untuk memahami keseluruhan pementasan maka perlu mengetahui masing-masing aktor dan perannya. Demikian dengan episode kekerasan, untuk memahaminya maka baik elaborasi dari perspektif korban, pelaku, dan penonton dengan segala motivasi, nilai, dan

pemahaman mereka, mau tidak mau harus dilakukan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh (*thick description*) atas episode kekerasan.

Tabel 2.1: Definisi Kekerasan

	Kekuatan	Maksud	Personhood	Legitimasi	Rasionalitas	Perspektif
Sempit	Kekuatan fisik terhadap individu	Dilakukan dengan sengaja	Manusia sebagai pelaku dan korban	Berdasarkan fakta kejadian	Tindakan irrasional.	Bias korban
Luas	Kekuatan fisik terhadap individu dan kekerasan struktural	Dilakukan dengan sengaja dan situasi mendesak.	'Korban' tidak terbatas manusia	Berdasarkan fakta kejadian dan nilai dan norma sosial.	Tindakan irrasional dan terdorong oleh situasi.	Perspektif korban, pelaku, dan penonton

Sumber: diolah dari Eller (2006)

Dalam penelitian ini kekerasan didefinisikan secara luas namun dengan pengecualian pada indikator *personhood* (lihat tabel 1). Dengan demikian kekerasan adalah penggunaan kekuatan atas fisik dan struktur yang dilakukan secara sengaja ataupun dalam situasi mendesak oleh manusia. Kekerasan adalah tindakan yang didorong oleh irrasionalitas dan desakan situasi serta memiliki keabsahan pada saat kejadian berlangsung maupun berdasarkan nilai dan norma tradisi. Dengan demikian, jika seorang mengalami kekerasan maka ia akan mengalami gangguan terhadap tubuhnya yang dapat berakibat pada rasa sakit secara fisik maupun psikologis.

Selain batasan definisi kekerasan yang telah dibahas di atas, penelitian ini juga membatasi pada bentuk kekerasan kolektif atau kelompok. Kekerasan kolektif atau kelompok adalah kekerasan yang terjadi antar kelompok mahasiswa, antara kelompok mahasiswa dengan individu, antara individu di dalam kelompok mahasiswa, dan antara negara dengan kelompok mahasiswa. Penelitian ini tidak memasukan kekerasan yang hanya melibatkan dua mahasiswa kecuali jika kekerasan ini menjadi memicu terjadi kekerasan kelompok mahasiswa.

II.2. Empat Teori Kekerasan Maha(Siswa)

Mengapa kekerasan di lingkungan siswa atau mahasiswa itu terjadi, sudah banyak dibahas di dalam studi-studi psikologi, sosiologi dan studi-studi lain. Studi-studi psikologi, misalnya, memahami kekerasan yang terjadi itu berkaitan dengan karakterkepribadian seseorang, contohnya akibat ketidakmampuan mengendalikan diri dari seseorang bisa berkonsekuensi terhadap munculnya kekerasan terhadap orang lain manakala terdapat perselisihan di antara mereka. Seperti yang dilakukan oleh Ozden Pzby dan Onur Koksoy (2009) yang menemukan fakta bahwa aksi kekerasan di lingkungan siswa di Turki itu sebagai akibat dari rendahnya kontrol terhadap diri sendiri (*low self-control*). Studi-studi sosiologi memahami kekerasan berkaitan dengan karakteristik sosiologis, seperti latar belakang sosial ekonomi, perbedaan status social dan kelas, dan karakteristik sosiologis lainnya. Studi yang dilakukan oleh Linda Watson Moore (1998), misalnya, melihat relasi antara kepemimpinan dengan kekerasan di kalangan siswa dan mahasiswa. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Angela R. Gover *et all.* (2008) melihat kekerasan itu berkaitan dengan latar belakang keluarga para siswa dan mahasiswa.

Secara sederhana John Martin Rich (1981) mengelompokkan empat teori untuk memahami kekerasan yang terjadi di lingkungan siswa dan mahasiswa. Pertama adalah teori disorganisasi (*social disorganization*). Teori ini menekankan pentingnya upaya untukmempertahankan sistem social melalui seperangkat norma-norma dan nilai-nilai yang akan menjadi pedoman interaksi antara anggota masyarakat satu dengan yang lain. Manakala masyarakat kehilangan consensus mengenai norma-norma dan nilai-nilai, bisa melahirkan disorganisasi sosial. Menurut RobertK. Merton (1957), disorganisasi social itu terjadi manakala tidak ada pelembagaan yang cukup mengenai tujuan yang hendak dicapai, prosedur yang dipakau untukmencapai tujuan juga tidak memadai, lemahnya kontrol sosial, dan lemahnya praktik-praktik sosialisasi.

Perilaku menyimpang, anomali, dan kekerasan merupakan konsekuensi dari adanya disorganisasi sosial itu. Kekerasan yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan juga demikian. Dalam pandangan teori ini, hal ini terjadi karena tidak adanya norma-norma, nilai-nilai, aturan, dan prosedur yang cukup di dalam lembaga pendidikan itu. Upaya untuk meminimalisasi kekerasan, dengan demikian, bisa dilakukan melalui perbaikan norma-norma dan nilai-nilai consensus, mengembangkan prosedur yang jelas, dan adanya praktik-praktik sosialisasi yang efektif. Usaha yang lebih operasional adalah melalui usaha bersama antara guru, administrator dan orang tua.

Kedua, teori konflik. Teori ini melihat masyarakat sebagai tempat dari berbagai kelompok yang saling bertentangan satu sama lain. Masing-masing kelompok memiliki kepentingan sendiri-sendiri dan berusaha untuk memenuhi kepentingannya itu. Padahal, kepentingan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain itu tidak selalu sama. Berdasarkan teori ini, kekerasan antara mahasiswa itu, atau antara mahasiswa dengan kelompok lain (penguasa negara atau universitas) terjadi akibat masing-masing memiliki perbedaan kepentingan. Kekerasan, dalam hal ini merupakan instrumen untuk mencapai kepentingan itu.

Ketiga adalah teori pelabelan (*labeling*). Teori ini berpendapat bahwa perilaku menyimpang, termasuk yang melahirkan kekerasan, bisa dijelaskan melalui interaksi antara orang-orang yang dianggap memiliki otoritas untuk memberikan label tertentu kepada seseorang. Pelabelan sendiri terdiri dari pengklasifikasian individu dan penyebutan status negatif terhadap orang tertentu. Seperti, orang yang suka mabuk disebut pemabuk atau peminum, orang yang suka menggunakan obat-obat terlarang disebut pengguna obat-obat terlarang, dan seterusnya. Pelabelan demikian membuat yang tersebut masuk di dalam kategori peyoratif dan akan melihat diri mereka secara negatif dan melihat yang lain berperilaku berbeda dengan diri mereka.

Keempat, teori perbedaan asosiasi (*differential association*). Teori yang dikembangkan oleh Edwin Sutherland (1959) ini berpendapat bahwa perilaku, baik yang menyimpang maupun tidak, itu merupakan hasil dari proses belajar di tempat yang sama, yaitu asosiasi atau kelompok. Perilaku menyimpang, termasuk adanya aksi kekerasan,

merupakan hasil dari interaksi personal di dalam kelompok itu. Hanya saja, interaksi ini merupakan interaksi yang berada di luar *mainstream* kelompok.

Instrumental dan Konstitutif

Adanya empat teori ini memperlihatkan betapa studi tindakan kekerasan telah menghasilkan banyak teori yang bersumber dari pendekatan biologis-psikologis dan sosial-antropologis. Pendekatan-pendekatan tersebut mencoba memahami “akar penyebab” atau faktor-faktor yang berkontribusi pada kekerasan yang bersumber dalam diri manusia (*internal*), seperti yang menjadi pokok besar pendekatan biologis-psikologis, maupun yang bersumber dari luar diri manusia (*external*) seperti banyak digunakan oleh pendekatan sosial-antropologis. Selain itu, pendekatan-pendekatan ini juga memetakan faktor-faktor yang memiliki peran penting dalam memformulasi dan menjustifikasi tindakan kekerasan, seperti integrasi ke dalam kelompok, identitas, ideologi, dan kepentingan (Eller, 2006).

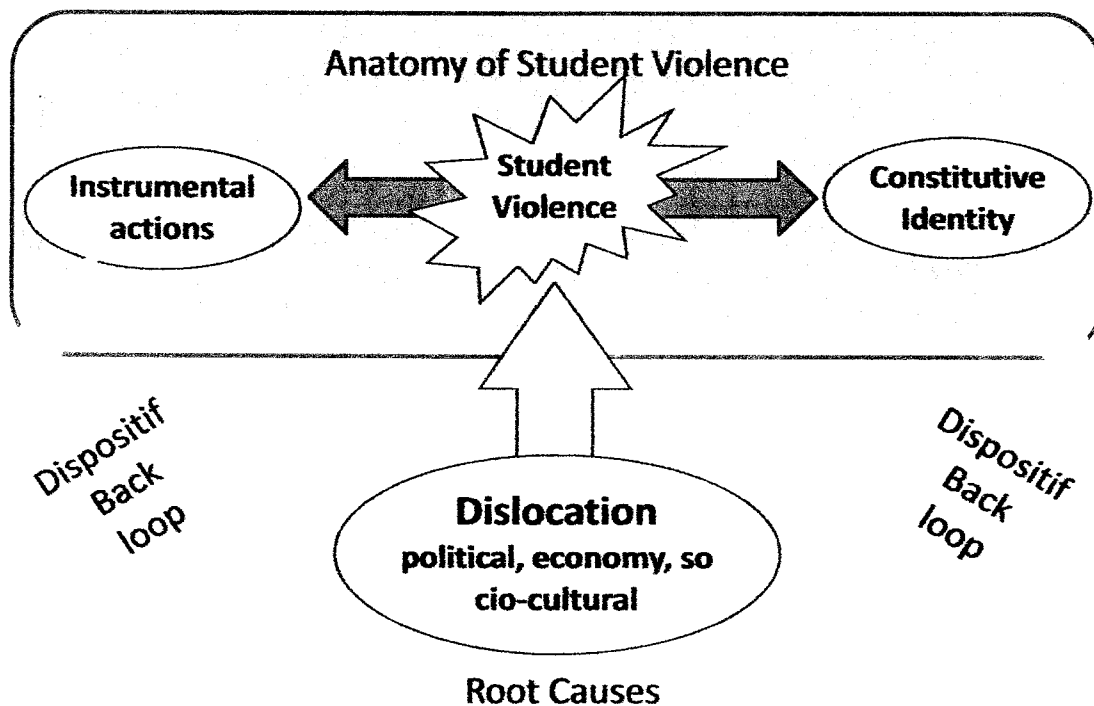
Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial-antropologis untuk membaca keberadaan mahasiswa dalam konteks sosial-politik di Kota Makassar. Pilihan ini bukan berarti bertendesi untuk meminggirkan kontribusi pendekatan biologis-psikologis dalam memahami kekerasan mahasiswa di Kota Makassar, namun lebih pada upaya untuk membedakan kasus Kota Makassar dibanding kota-kota lain di Indonesia. Pendekatan sosial-antropologis terhadap kekerasan dapat dipahami melalui konsep *dislokasi* (lihat gambar 1). Dislokasi memandang penting kondisi kontegensi dimana setiap objek sosial dan hubungan sosial selalu dalam status menyesuaikan atau menciptakan kondisi yang dianggap sesuai.

no matter how smoothly something functions, or how unproblematised some practise appear the theory claim that it is constitutively 'out of joint': any social object or relation are never quit able to rest peacefully in its 'proper place' – in fact there are no proper places. The social is not a jigsaw puzzle (Laclau 1991).

Proses kontegensi terhadap sebuah kondisi termanifestasi dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah kekerasan. Faktor-faktor yang memformulasi dan menjustifikasi kekerasan dapat dikelompokkan ke dalam dua katagori, yaitu: faktor-faktor yang bersifat

instrumental dan konstitutif. Instrumental berarti menjadikan kekerasan sebagai alat untuk mencapai tujuan/kepentingan. Hal ini menjadi mungkin dilakukan karena tidak adanya saluran-saluran yang dapat mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mahasiswa, walaupun saluran-saluran telah tersedia berarti ada persoalan yang mengakibatkan tidak bekerja maksimal. Konstitutif berarti menempatkan kekerasan sebagai tindakan penegasan identitas mahasiswa. Mereka tidak mempersoalkan ada atau tidaknya saluran untuk menunjukkan eksistensi identitasnya, namun hanya dengan kekerasan identitas mereka menjadi ada. Ini dapat berujung pada, salah satunya, ideologi gerakan.

Gambar 1: Anatomi Kekerasan Mahasiswa



BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

III.1. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan pola kekerasan yang melibatkan mahasiswa di Kota Makassar. Secara lebih rinci, tujuannya adalah untuk mengetahui:

1. Pola-pola kekerasan yang melibatkan mahasiswa di Kota Makassar;
2. Sumber-sumber referensi yang menjustifikasi tindakan kekerasan mahasiswa di Kota Makassar;
3. Hubungan antara pola-pola kekerasan mahasiswa dengan sumber-sumber referensi yang menjustifikasi tindakan kekerasan mahasiswa di Kota Makassar;

III.2. Manfaat Penelitian

Penelitian merupakan kelanjutan dari penelitian-penelitian dengan tema serupa yang telah ada namun dengan perspektif atau cara pandang yang berbeda yang tentunya lebih lengkap dari penelitian yang pernah dibuat. Nilai penting dari penelitian ini adalah memahami kekerasan mahasiswa di Kota Makassar secara lebih mendalam dan memberikan advokasi kepada pemangku kepentingan pendidikan di Kota Makassar untuk bersama-sama menghentikan kekerasan mahasiswa. Hal tersebut menjadi sangat mendesak mengingat potensi intelektualitas dan pemimpin yang tersemat pada mahasiswa jangan sampai ternodai oleh karakter dan sifat kekerasan. Dengan menghentikan kekerasan mahasiswa, apakah itu disebabkan oleh perilaku, budaya, ataupun hambatan struktural, berarti dapat memutus rantai-rantai kekerasan dimasa akan datang.

Penelitian ini, secara praktis bermanfaat untuk para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya untuk meminimalisasi atau bahkan mengatasi kekerasan yang melibatkan mahasiswa.

BAB IV

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun paradigma yang digunakan berakar dalam antropologi budaya dan sosiologi. Pada umumnya, paradigma ini merupakan sebuah proses investigasi untuk memahami fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, meniru, mengkatalogkan, dan mengklasifikasikan subjek penelitian, yakni pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan aksi kekerasan yang melibatkan mahasiswa di Kota Makassar.

Di dalam melakukan penelitian ini, digunakan asumsi teoritik sebagai berikut: kekerasan mahasiswa di Kota Makassar cenderung digunakan sebagai metode/alat untuk mendramatisasikan tuntutan-tuntutan (*instrumental*) maupun penegasan identitas (*constitutive*) yang telah terinternalisasi dalam perilaku keseharian mahasiswanya. Dari asumsi yang diangkat di dalam penelitian sebagaimana kami rumuskan di atas, pendekatan yang digunakan adalah studi kasus (*case study*) yang membatasi penelitian pada bidang disiplin ilmu politik, walaupun tidak menutup kemungkinan adanya kaitan dengan sosiologi, antropologi dan disiplin-disiplin ilmu yang lain.

Penelitian ini bersifat interpretatif sehingga tidak bisa dilepaskan dari masalah bias, nilai. Penelitian ini membatasi subjek penelitian pada kasus-kasus kekerasan mahasiswa di Kota Makassar yang telah menjadi jalinan rantai yang sedemikian rupa sehingga sudah sangat mengkhawatirkan berbagai pihak. Dengan menggunakan metodologi kualitatif dan pendekatan ilmu politik, penelitian ini dilakukan selama 6 bulan di tahun 2011.

Langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan: (a) Penetapan batas-batas penelitian. Penelitian ini membatasi subjek penelitian pada kasus-kasus kekerasan mahasiswa di Kota Makassar; (b) Informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui pengamatan langsung, wawancara dengan berbagai pihak yang terkait, pengumpulan data-data dokumentasi dan data-data visual. Di dalam mengumpulkan informasi dengan subyek penelitian, peneliti melakukannya di dalam dua

tahapan. Pertama adalah melakukan wawancara mendalam dengan individu-individu, yang mencakup para mahasiswa yang pernah terlibat di dalam aksi kekerasan, para pemimpin badan-badan eksekutif mahasiswa, para dosen dan pejabat universitas yang berkaitan dengan mahasiswa, aparat pemerintahan seperti dari pemerintah daerah dan kepolisian. Tahap kedua adalah melakukan wawancara dan diskusi di dalam Focus Group Discussion (FGD) untuk mendalami temuan-temuan dan melakukan *cross check* informasi dengan pihak-pihak yang terkait. Di dalam FGD ini dibagi di dalam dua sesi. Pertama adalah sesi yang melibatkan dosen, pejabat universitas dan pemerintahan. Kedua adalah sesi yang melibatkan mahasiswa dan mantan aktivis. Perbedaan sesi ini dilakukan untuk menghindari adanya silang pendapat yang tidak perlu antara mahasiswa dan mantan aktivis dengan pejabat universitas dan pemerintahan.

Hal lain adalah berkaitan dengan penetapan prosedur untuk mencatat informasi dan/atau data. Dalam penelitian ini pencatatan data dilakukan dengan: (a) Menyalin hasil wawancara sekomprensif mungkin yang didapatkan dari wawancara yang menggunakan audiotape ke dalam transkrip tulisan sehingga dapat dibaca; (b) Mencatat dokumentasi dan materi-materi dari para informan dan pihak-pihak terkait yang diperlukan dalam penelitian.

Prosedur analisa data dalam penelitian ini bersifat selektif (tidak semua data yang diperoleh dilaporkan/dijelaskan dalam penelitian) sejauh masih relevan dengan tema penelitian. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses analisa data dalam penelitian ini yaitu:

- Dalam analisa penelitian kualitatif ini, beberapa kegiatan yang menyita perhatian kami yaitu mengumpulkan informasi dari lapangan, menyortir informasi menjadi kelompok-kelompok, memformat informasi ke dalam sebuah cerita atau gambar, dan menuliskannya dalam naskah kualitatif;
- Kami akan mengambil informasi dan data dalam jumlah besar dan menguranginya hingga ke pola, pemetaan, kategori, atau tema tertentu dan

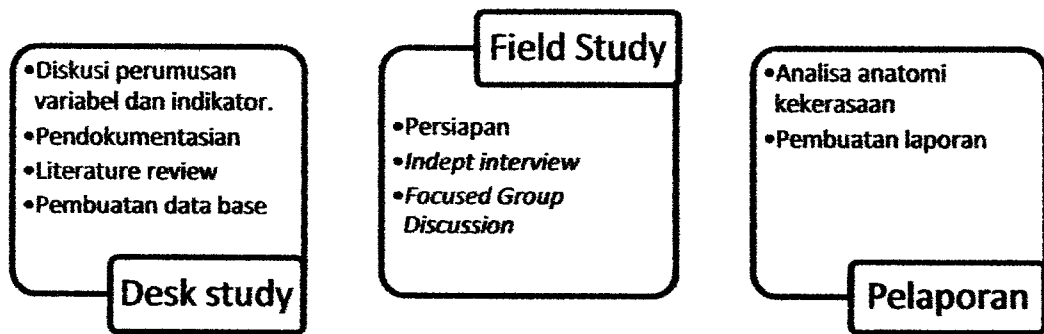
kemudian menafsirkan informasi dan data tersebut dengan menggunakan sejumlah skema, diagram, tabel dan sebagainya sehingga menjadi lebih jelas;

- Setelah proses pengkategorian dan penafsiran data atau informasi yang diperoleh, kami akan melakukan identifikasi prosedur pengkodean yang akan digunakan untuk mengurangi informasi dan data sehingga menjadi tematik atau kategoris.

Untuk memastikan keabsahan internal, strategi-strategi berikut ini akan kami lakukan:

- a) Triangulasi data: data akan dikumpulkan melalui sumber-sumber majemuk untuk memasukkan wawancara, pengamatan dan analisa dokumen;
- b) Pemeriksaan anggota: informan akan berperan sebagai pemeriksa sepanjang proses analisa. Dialog yang berkesinambungan menyangkut interpretasi kami tentang realitas dan pihak-pihak lain di luar tim peneliti yang berkompeten akan memastikan kejujuran data;
- c) Pengamatan di lokasi penelitian: pengamatan tetap dan berulang terhadap fenomena dan latar serupa akan berlangsung di lokasi selama masa penelitian;
- d) Mode penelitian partisipatif: informan akan dilibatkan dalam sebagian besar tahap penelitian, dari pencarian data penelitian di lapangan hingga pemeriksaan penafsiran dan kesimpulan;

Gambar 2: Alur Penelitian



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil dan analisis atau pembahasan temuan studi. Bagian pertama, berkait dengan setting penelitian, yaitu untuk memahami karakteristik masyarakat di Kota Makassar. Bagian kedua, berkaitan dengan temuan-temuan, dan ketiga analisis. Di bagian kedua ini akan disajikan fenomena gerakan mahasiswa dan kekerasan yang melibatkan mahasiswa di Kota Makassar. Setelah itu disajikan analisis mengenai pola kekerasan yang melibatkan mahasiswa, sumber-sumber yang dijadikan sebagai rujukan di dalam melakukan tindakan kekerasan, hubungan antara pola kekerasan dan sumber-sumber rujukan atau referensi di dalam melakukan tindakan kekerasan, dan peran pihak-pihak yang terkait di dalam mengatasi aksi kekerasan mahasiswa di Kota Makassar.

V.1. Sulawesi Selatan: Ayam dan Sumber Konflik

Makassar tidak hanya salah satu kota terbesar di Indonesia Timur, melainkan juga pintu gerbang utama untuk Indonesia Timur. Transportasi utama menuju Indonesia Timur, baik melalui transportasi udara (pesawat terbang) maupun transportasi laut (kapal laut) dari daerah-daerah Indonesia di wilayah Barat, sebagian besar menjadikan Makassar sebagai daerah transit. Demikian pula sebaliknya, dari daerah-daerah Indonesia Timur ke Barat. Lokasi geografis Makassar yang strategis di dalam hubungan itu, membuat Makassar lebih penting dari kota-kota lain di kawasan Timur Indonesia.

Sejarah nusantara juga mencatat pentingnya Sulawesi Selatan pada umumnya dan Makassar pada khususnya. Di masa lalu, ada tiga kerajaan besar di Sulawesi Selatan yang cukup besar. Pertama adalah Kerajaan Luwu, yang mengalami kejayaan antara abad ke-10 sampai abad ke-16. Luwu merupakan kerajaan tertua, terbesar dan terluas di Sulawesi Selatan. Wilayahnya meliputi Tana Luwu, Tana Toraja, Kolaka dan Poso. Kerajaan Luwu didomikasi oleh Suku Luwu, sebuah suku bangsa yang cukup besar yang terdiri dari 12 anak suku. Kedua adalah kerajaan Gowa yang mengalami kejayaan pada

abad ke-16 sampai abad ke-1). Kerajaan Gowa atau Kerajaan Makasar didirikan oleh Suku Makasar. Ketiga, Kesultanan Bone yang mengalami kejayaan pada abad ke-17 sampai abad ke-19. Kesultanan Bone didirikan oleh suku Bugis.

Meskipun Sulawesi Selatan dihuni oleh sejumlah suku, terdapat dua suku dominan di Propinsi ini, yaitu Suku Bugis dan Suku Makassar. Suku-suku lainnya adalah Mandar, Toraja, Jawa, dan suku-suku lainnya. Secara geografis dua suku utama itu menempati wilayah-wilayah tertentu. Orang-orang dari Suku Bugis lebih banyak bermukim di Bulukumba, Sinjai, Bone, Wajo, Sidenreng-Rappang (sidrap), Pinrang, Polewali-Mamasa (Polmas), Enrekang, Luwu, Pare-Pare, Barru, Pangkajene-Kepulauan (Pangkep) dan Maros. Sedangkan orang-orang dari Suku Makassar lebih banyak bermukim di Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng dan Selayar walaupun mempunyai dialek tersendiri.

Dalam sejarahnya, orang-orang Bugis dan Makasar identik dengan ayam. Ini merupakan simbol keberanian atau kejantanan (*to-barani*). Dalam bahasa Bugis disebut *Manu'* sedangkan dalam bahasa Makassar disebut *Jangang*. Menurut cerita, ayam merupakan hewan simbolis sekaligus pertarungan gengsi bagi laki-laki. Itulah sebabnya, Raja Gowa ke-16, *I Mallombasi Daeng Mattawang Sultan Hasanuddin*, pernah diberi gelar "*Haaantjes van het Oosten*" yang berarti "Ayam Jantan dari Timur". Ini pula yang menjadi lambang Universitas Hasanudin saat ini.

Ayam dalam budaya orang Bugis dan Makassar memiliki makna yang sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, orang-orang Bugis dan Makassar memiliki kepercayaan, firasat, alamat atau pertanda yang berkaitan dengan ayam ini. Pertama, apabila terdapat fenomena ayam betina beradu di bawah kolong rumah, hal itu merupakan pertanda bahwa yang mempunyai rumah akan kedatangan tamu. Kedua, manakala terdapat ayam betina berkotek di waktu malam hal itu diberi makna akan ada kerabat yang akan meninggal. Ayam yang demikian disebut "Manu' patula-tula" dan harus disembelih, tidak boleh dibiarkan bertelur karena dapat membawa sial atau mala pelaka. Ketiga, apabila terdapat ayam memakai jambul (*simpolong*), hal itu bermakna bahwa ayam itu tidak baik dipelihara karena bisa membawa sial. Keempat, apabila

terdapat ayam berbulu kelabu (*kawu*) ayam tersebut juga tidak baik untuk dipelihara karena dianggap *sorokau* (ayam pembawa sial). Terakhir, apabila terdapat ayam jantan berkokok seperti menyuarakan 'pelihara aku' (*makkau*) maka ayam tersebut baik untuk dipelihara karena dianggap pembawa rezeki.

Ayam, dalam sejarah Sulawesi Selatan tidak hanya penting secara kultural, tetapi juga secara politik. Dalam kitab *La Galigo* diceritakan bahwa tokoh utama dalam epik mitik itu, *Sawerigading*, kesukannya menyabung ayam. Dahulu, orang tidak disebut pemberani (*to-barani*) jika tidak memiliki kebiasaan minum arak (*angnginung ballo*), judi (*abbotoro*), dan *massaung manu'* (adu ayam), dan untuk menyatakan keberanian orang itu, biasanya dibandingkan atau diasosiasikan dengan ayam jantan paling berani di kampungnya (di negerinya), seperti *Buleng-Bulengna Mangasa*, *Korona Mannongkoki*, *Barumbunna Pa'la'lakkang*, *Buluarana Teko*, *Campagana Ilagaruda (Galesong)*, *Bakka Lolona Sawitto* dan lain sebagainya. Dan hal sangat penting yang belum banyak diungkap dalam buku sejarah adalah fakta bahwa awal konflik dan perang antara dua negara adikuasa, penguasa semenanjung barat dan timur jazirah Sulawesi Selatan, Kerajaan Gowa dan Bone diawali dengan "Massaung Manu'" (sabung ayam).

Dalam sebuah kisah disebutkam, pada tahun 1562, *Raja Gowa X, I Mariogau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tunipalangga Ulaweng* (1548 – 1565) mengadakan kunjungan resmi ke Kerajaan Bone dan disambut sebagai tamu negara. Kedatangannya dimeriahkan dengan acara *massaung manu'*. Raja Gowa, Daeng Bonto, mengajak Raja Bone *La Tenrirawe Bongkange'* bertaruh dalam sabung ayam tersebut. Taruhan Raja Gowa 100 katie emas, sedang Raja Bone sendiri mempertaruhkan segenap orang *Panyula* (satu kampung). Sabung ayam antara dua raja penguasa semenanjung Timur dan Barat ini bukanlah sabung ayam biasa, melainkan pertandingan kesaktian dan kharisma. Hasilnya ayam sabungan Gowa yang berwarna merah (Jangang Ejana Gowa) mati terbunuh oleh ayam sabungan Bone (Manu Bakkana Bone).

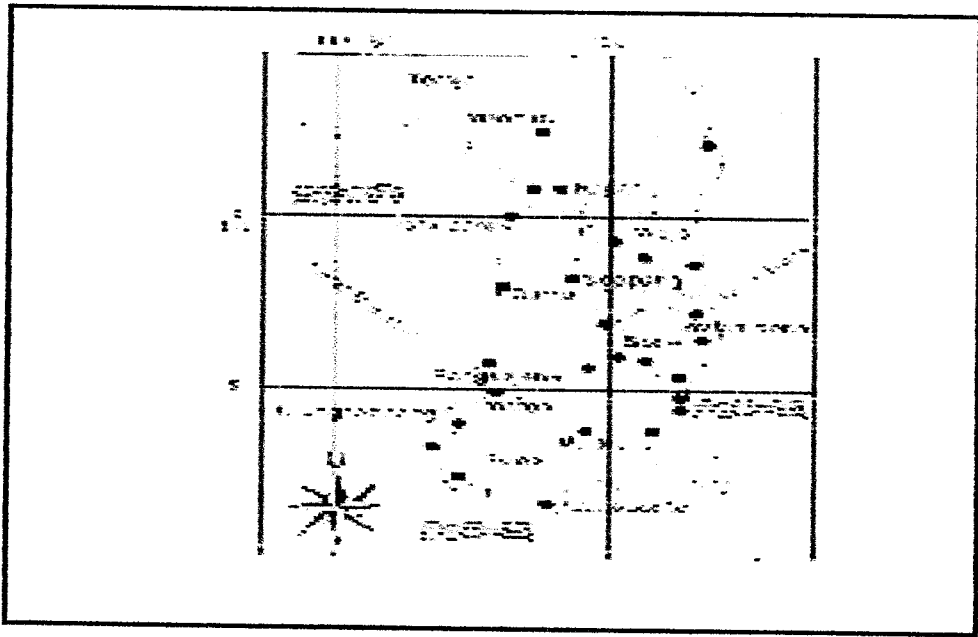
Kematian ayam sabungan Raja Gowa merupakan fenomena kekalahan kesaktian dan kharisma Raja Gowa oleh Raja Bone, sehingga Raja Gowa *Daeng Bonto* merasa terpukul dan malu. Tragedi ini dipandang sebagai peristiwa *siri'* oleh

Kerajaan Gowa. Di lain pihak, kemenangan Manu Bakkana Bone menempatkan Kerajaan Bone dalam posisi psikologis yang kuat terhadap kerajaan-kerajaan kecil yang terletak di sekitarnya. Dampak positifnya, tidak lama sesudah peristiwa sabung ayam tersebut serta merta kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Kerajaan Bone menyatakan diri bergabung dengan atau tanpa tekanan militer, seperti Ajang Ale, Awo, Teko, serta negeri Tellu Limpoe.

Peristiwa itu menunjukkan betapa besar pengaruh psikologis '*Massaung Manu*' tersebut sehingga menjadi pangkal konflik dan perang Kerajaan Bone melawan Kerajaan Gowa. Bergabungnya Tellu Limpoe menjadi Wanua Palili Bone yang sebelumnya berstatus Wanua Palili Kerajaan Gowa dijadikan dalih oleh Gowa untuk melancarkan serangan militer pertama ke Bone dalam tahun 1562. Tahun berikutnya, serangan militer kedua menyusul dengan jumlah pasukan yang lebih besar, Serangan militer ketiga dan keempat dilancarkan lagi dalam tahun 1565. *Raja Gowa XI, I Tajibarani Daeng Marumpa Karaeng Data Tunibata* yang hanya naik takhta selama 20 hari ini tewas dalam peperangan ini. Dalam setiap serangan militer Kerajaan Gowa terhadap Kerajaan Bone, Kerajaan Gowa tidak pernah menaklukkan betul Kerajaan Bone sehingga selalu diakhiri dengan perjanjian Perdamaian, namun Kerajaan Gowa selalu mengingkari perjanjian itu dan tetap menunggu kesempatan yang baik untuk menaklukkan Kerajaan Bone. Dalam tahun 1575, dilancarkanlah serangan militer kelima sampai akhirnya Bone benar-benar dikalahkan dan ditaklukkan dimasa pemerintahan Raja Gowa I *Mangerangi Daeng Manrabia Sultan Alauddin Tumenanga ri Gaukanna* dalam tahun 1611.

Sejarah konflik dan Perang Gowa melawan Bone ini menarik dicermati karena diakhir penaklukan Bone oleh Gowa, alasan perang yang dipakai Sultan Alauddin adalah alasan "Bundu Kasallangan" atau "Musu Sellenge", yaitu memerangi suatu kerajaan supaya masuk Islam. Sementara dalam istana Bone, beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh Gowa merupakan satu pelanggaran kedaulatan negara atas negara lain sehingga setiap peperangan harus dibalas dengan peperangan. Di belakang hari, sebab inilah yang memicu kebangkitan semangat *Arung Palakka* untuk memerdekakan Bone

(Negeri Bugis) atas penjajahan Gowa, terlebih lagi setelah pengerahan sekitar 40.000 tenaga kerja paksa orang Bone-Soppeng membangun Benteng-Benteng Makassar. (Makkulau, 2008).



Gambar 3: Peta Kerajaan Gowa dan Bone

Kalau kita melihat sejarah daerah Sulawesi Selatan, konflik dua kerajaan ini selalu direproduksi. Konflik ini kemudian menjadi semacam memori masa lalu yang selalu dan senantiasa “belum selesai”. Konflik di masyarakat, bahkan khususnya yang melibatkan mahasiswa, terjadi diantaranya juga karena adanya sentimen organisasi daerah (Organda) yang berasal dari beberapa daerah yang dulunya pernah berkonflik. Mereka mereproduksi identitas kolektif kesukuan mereka sekaligus memori-memori kolektif masa lalu yang belum selesai tersebut. Suku-suku yang sering terlibat konflik seperti Luwu, Bone, Jeneponto. Bentrok atau tawuran antar suku juga terjadi di Selatan Kota Makassar. Suku-suku yang berkonflik seperti Luwu vs Bone, Makassar vs Luwu, Jeneponto vs Bone. Kekerasan yang terus selalu tereproduksi ini dipengaruhi juga oleh

lambang daerah-daerah yang menyimbolkan kekerasan dengan menyertakan gambar “Badik” (senjata tajam khas Makassar). Sampai sekarang pun masyarakat Makassar masih ada yang selalu membawa Badik saat berpergian.

Filosofi masyarakat Bugis yang bisa membangun *esprit de corps* dan identitas kolektif seperti *Mali siparappe* (hanyut saling menyelamatkan), *Rebba sipatokkong* (tumbang saling menegakkan), *Malelu Sipakainge* (terlupa saling mengingatkan), *taro ada taro gau* (berjanji sama menunaikan), *fada idi fada elo* (jalin tekad dalam kebersamaan).

Di samping adanya akar kesejarahan semacam itu, terdapat sejumlah akar kultural lain yang diperkirakan berpengaruh terhadap munculnya konflik, termasuk aksi kekerasan di Sulawesi selatan. Pertama, berkaitan dengan karakteristik orang Bugis dan Makassar. Seperti yang dijelaskan dalam buku Lontara masyarakat Bugis-Makassar mempunyai falsafah hidup. *Pertama, Aja mupakasiriwi, materi-tu*. Jangan permalukan dia, sebab dia akan memilih lebih baik mati daripada dipermalukan. *Kedua, Ajamullebbaiwi, nabokoiko-tu*. Jangan kecewakan dia, sebab jika dikecewakan pasti meninggalkan anda. Masyarakat Bugis-Makassar untuk menjaga harga dirinya supaya tidak dipermalukan untuk mempertahankannya akan mempertaruhkan harta bendanya. *“Iamua narisappa warangparange, nasaba rialai pallawasirik. Narekko sirik Ba’na Lao, sungenatu naranreng.”*

Kedua berkaitan dengan konsep siri. Masyarakat Bugis mempunyai ajaran atau falsafah hidup untuk lebih baik atau memposisikan diri lebih di atas terhadap sesamanya (masyarakat lain) melalui konsep *Siri’*. *Siri’* merupakan konsep keperibadian yang menjadi falsafah hidup masyarakat Bugis. *Siri’ na pesse* dijadikan hukum kehidupan. Jika seseorang tidak lagi memiliki *siri’* maka dapat dinilai individu itu tidak lagi memiliki kepribadian dan bermakna mati dalam aspek psikologis. Seperti yang terdapat dalam ungkapan *“siri’ mi tu narituo”* (karena malu kita hidup). Malu menjadi miskin, malu menjadi seorang yang tidak taat pada *sara’* (aturan agama). *“Masiri’ tuo*

mappale” (malu hidup menadahkan tangan) menjadi falsafah hidup yang dipegang teguh oleh masyarakat Bugis. Singkatnya, *siri*’ merupakan sebuah rasa malu yang terurai dalam dimensi-dimensi harkat dan martabat manusia atau rasa dendam dalam hal-hal yang berkaitan dengan kerangka kemuliaan dan pemulihan harga diri yang disesuaikan dengan norma-norma atau aturan adat dan *sara*’ (hukum Islam) yang berlaku.

Seseorang akan merasa malu jika tidak dapat menempatkan diri dalam kondisi hidup yang layak. Hidup layak dalam makna pengakuan terhadap eksistensi diri sebagai pribadi yang bermartabat.¹ Ketika seseorang bersilaturahmi kepada orang yang lain, ketika seorang bershalawat kepada Nabi atau ketika seseorang sedang melaksanakan shalat, demikian juga ketika seseorang sedang bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka orang tersebut sedang dalam proses menjaga interaksi atau *siri*’-nya. Seseorang yang bermasalah dengan urusan silaturahmi, shalawatnya atau shalatnya, dan pekerjaannya, tentulah merupakan orang-orang yang juga bermasalah dalam urusan rasa malu atau *siri*’-nya.

Siri’ juga berkaitan dengan *reso* atau kerja keras yang dilakukan dengan niat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seseorang akan hidup mulia dengan bekerja keras dan giat dalam mewujudkan apa yang menjadi impian yang harus dicapai. Seseorang akan “*masiri tuo mappale*” (malu hidup menadahkan tangan) jika seseorang tidak mau dan tidak bisa ‘*mareso massapa dallek*’ (bekerja keras mencari rezeki). Lazimnya, masyarakat Bugis sangat menyenangi hidup dengan etos kerja yang tinggi. Disiplin dan tidak mudah terpengaruh terhadap hal-hal negative yang dapat mengurangi aktifitasnya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup.

Masyarakat Bugis perantau, *siri*’ tetap menjadi bagian hidup mereka. Meskipun kondisi ini lebih diwarisi sebagai keteladanan yang disaksikan generasi demi generasi. Penjabaran falsafah *siri*’ pada kenyataannya sudah mengalami degradasi. Sehingga sering kali *siri*’ dimaknai sebagai upaya balas dendam jika terdapat pihak

¹ Dampak negatif dari masyarakat cenderung “*show off*” atas harta yang dimilikinya supaya dianggap sebagai orang yang bermartabat. Sebagai contoh selalu memakai semua perhiasannya ketika ada undangan perkawinan atau acara-acara resmi lainnya.

tertentu yang dirasakan menyinggung perasaan. Aksi seperti ini bisa saja disebut sebagai bentuk perwujudan rasa siri' namun sayangnya tidak jarang rasa *siri'* itu juga dipicu oleh pihak lain yang "*de' ga sirina*"(tidak memiliki rasa malu). Jika seseorang memiliki sesuatu niat atau tujuan yang tidak baik, maka dalam konteks *siri'*, orang tersebut sebenarnya sudah mati atau tetap hidup namun "*tuo fappadai olo' kolo'e*" (hidup sama dengan binatang).

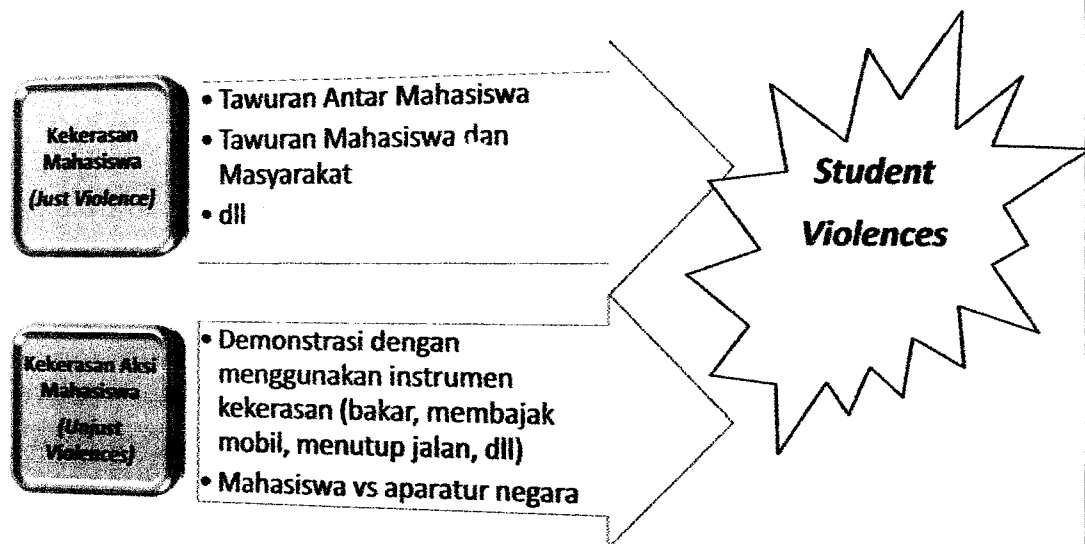
Hal inilah sebenarnya yang dinilai penting untuk dipahami bersama, karena *siri'* dalam berbagai dimensi pemaknaannya akan menjadikan seseorang berusaha hidup dengan memiliki martabat diri. Bekerja keras untuk tidak menjadi orang yang memiliki rasa malu (*masiri'*) dan kreatif dalam bekerja demi mewujudkan '*masiri narekko tuo mappale*' (malu jika hidup menjadi beban orang lain).

Ketiga, berkaitan dengan falsafat tiga ujung. Masyarakat Bugis-Makassar, di samping memiliki simbol-simbol budaya yang telah dijelaskan di atas, juga memiliki falsafah hidup yang diinternalisasi sedemikian rupa sehingga menjadi semacam ajaran untuk meraih kehidupan yang baik. Falsafah hidup ini tertuang dalam "Falsafah Tiga Ujung (*Tallu Cappa*)", sekaligus maknanya. Pertama, Ujung Lidah (*Cappa Lila*). Dalam menyelesaikan masalah harus dengan jalan diplomasi atau pembicaraan terlebih dahulu. Ujung lidah ini juga bisa diartikan kecerdasan dalam segala hal, seperti kemampuan membedakan baik dan buruk. Di samping itu, masyarakat Bugis-Makassar memiliki tujuan hidup untuk meraih kecerdasan dengan menimba ilmu dengan baik sehingga mampu menghasilkan pendapat-pendapat yang baik. Kedua, Ujung Kemaluan (*Cappa Buto*). Apabila cara pertama gagal, maka bisa dilakukan dengan mengadakan perkawinan antara kedua belah pihak yang bertikai. Tujuan dari perkawinan ini diharapkan bisa menjalin kekerabatan yang lebih. Selain itu *Cappa Buto* bisa dimaknai bahwa untuk meraih kehormatan hidup, apabila tidak mampu meraihnya dengan cara *Cappa Lila* hendaknya menggunakan cara *Cappa Buto* ini, yakni mencari pasangan hidup dari keluarga terhormat dan/atau kaya. Ketiga, Ujung Badik (*Cappa Badik*). Apabila kedua cara di atas gagal, maka cara terakhir adalah dengan peperangan untuk mempertahankan harga diri dan menunjukkan keberanian. *Cappa Badik* juga bisa dimaknai dengan ajaran

untuk meraih kehormatan hidup dengan menggunakan cara kekerasan (secara paksa) apabila memang cara pertama dan kedua di atas tidak mampu untuk dilakukan. Filosofi *Coppa Badik* inilah yang dalam perkembangan zaman (kini) menjadi alasan pembenar bagi berlangsungnya kekerasan baik di masyarakat Bugis-Makassar secara umum maupun mahasiswa khususnya.

V.2. Memahami Kekerasan Mahasiswa di Makassar

Untuk memahami kekerasan mahasiswa, peneliti memberikan batasan terhadap definisi apa yang dimaksud dengan kekerasan mahasiswa, karena pada prakteknya kekerasan mahasiswa ini memiliki bentuk yang beragam dan bervariasi, beragam pula motif maupun kelompok mahasiswa yang terlibat. Penelitian ini mencoba untuk memberikan pilahan terhadap apa yang dimaksud dengan kekerasan mahasiswa tersebut dengan didasarkan pada motifnya. Kekerasan mahasiswa yang pertama adalah kekerasan yang dimaknai sebagai kekerasan *an sich* (*just violence*). Tipologi kekerasan yang kedua adalah kekerasan aksi mahasiswa (*unjust violence*). Berangkat dari dua tipologi diatas, peneliti akan mencoba memberikan deskripsi dari pola kekerasan yang menyelimuti dunia mahasiswa. Sedangkan dilihat dari dimensi kekerasannya setidaknya terdapat dua tipe kekerasan, yang bersifat personal dan yang bersifat kolektif atau sosial. Kekerasan personal berakar pada konflik personal, sementara kekerasan sosial umumnya berakar pada konflik sosial. Seperti yang telah disinggung di bab tiga dalam penelitian ini, objek dari studi ini adalah kekerasan yang bersifat sosial/kolektif, yaitu kekerasan social bukan kekerasan yang personal. Tetapi peneliti juga akan memasukan kekerasan personal yang memiliki akar kuat pada suatu konflik sosial, dimasukkan ke dalam kategori kekerasan social. Misalkan perkelahian antara dua pemuda katakanlah A dan B, perkelahian yang dikarenakan pacar dari A digoda oleh B, perkelahian ini berdampak pada tawuran massa antar kelompoknya A dan B.

Gambar 4: Kekerasan Mahasiswa & Kekerasan Aksi Mahasiswa

Tipologi kekerasan mahasiswa yang pertama yang dimaknai seperti halnya peristiwa kekerasan pada umumnya (*just violence*), maka praktik kekerasan yang termasuk dalam tipologi ini adalah tawuran antar mahasiswa. Kita tahu bahwa tawuran mahasiswa tidak beda dengan tawuran lainnya dalam masyarakat Indonesia, seperti halnya tawuran antar desa, antar kelompok, antar banjar, dst. Seringkali tawuran berangkat dari perasaan solidaritas membela salah satu anggotanya maupun menjaga kehormatan kelompok. Fenomena tawuran dalam kacamata sosiologi budaya disebut sebagai solidaritas kelompok (*corporate solidarity*). Pemicu tawuran pun tidak jarang disebabkan oleh permasalahan yang sepele, misal satu pemuda mengganggu gadis dari desa lain, berakhir dengan serangan dari pihak pemuda di mana gadis itu berasal. Solidaritas kelompok merupakan fenomena yang dilematis, karena dia bisa menjadi sebuah gerakan positif seperti gotong royong, namun ia bisa berubah liar menjadi gerakan yang destruktif dan amat menghancurkan citra sebuah peradaban dan bahkan menimbulkan stereotype dan prasangka terhadap entitas diluar kelompoknya. Tindakan seperti ini harus dipahami sebagai bentuk penegasan identitas atau diistilahkan sebagai identitas kelompok (*corporate identity*). Corak kelompok selalu ditandai dengan

keseragaman, karena mereka mengidentikkan diri mereka ke dalam kelompok, itu sebabnya dalam kelompok sosial selalu melahirkan “*we group*” dan lainnya “*they group*” (Hiebert: 1983,183-184). Pengelompokan ini selalu ditandai dengan kebanggaan kelompok (*pride*) dan meminggirkan kelompok lain (*discrimination*).

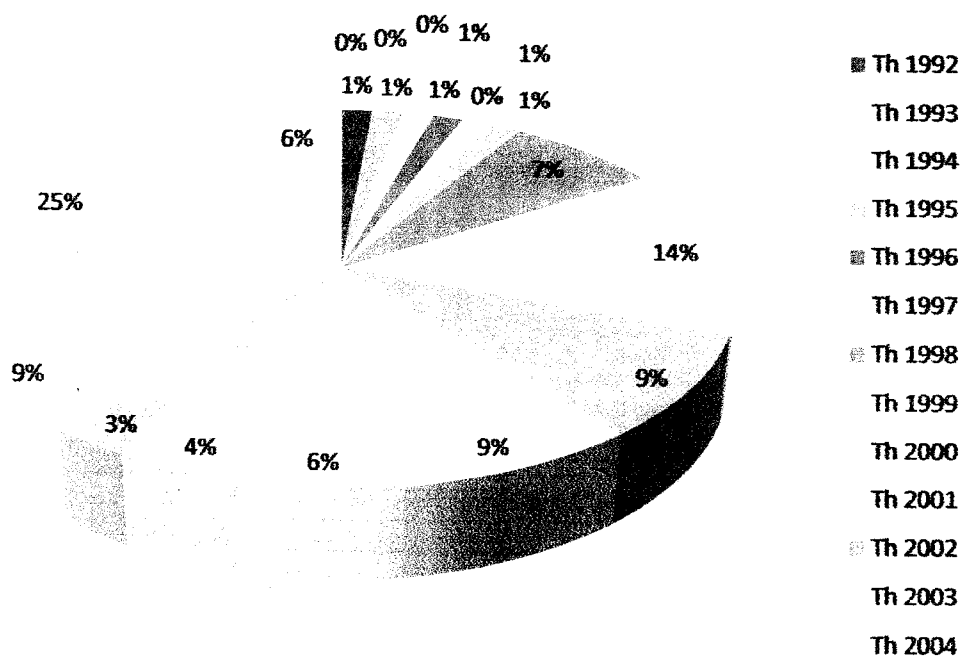
Dengan menggunakan pendekatan solidaritas kelompok untuk memahami tawuran mahasiswa masih kontekstual, karena dalam dunia mahasiswa didalamnya terdapat sekat-sekat yang dibentuk dalam bentuk kelompok-kelompok, baik pilahan yang secara formalistic harus ada seperti halnya fakultas dan jurusan, maupun pilahan yang terbentuk karena tangan kreatif dari mahasiswa itu sendiri. Dengan asumsi ini peneliti mencoba untuk mengidentifikasi referensi solidaritas kelompok yang terbentuk karena pilahan-pilahan tersebut.

Tipologi yang kedua, kekerasan aksi mahasiswa atau *unjust violence* merupakan praktik kekerasan mahasiswa yang memiliki semangat perjuangan yang normative didalamnya, sehingga dalam tipologi kedua ini selalu ada latarbelakang pembelar perjuangan, misalkan ideology, atau bahkan atas nama rakyat yang mereka perjuangkan. Kekerasan aksi mahasiswa ini seringkali mewarnai aksi demonstrasi mahasiswa. Demonstrasi yang pada dasarnya berangkat dari nilai-nilai perjuangan yang mulia, maupun semangat untuk meramaikan demokrasi malah berujung pada aksi kekerasan. Untuk memahami kekerasan aksi mahasiswa peneliti menggunakan pendekatan sosio-antropologis dengan menggunakan dua konsep untuk memahami justifikasi kekerasan aksi mahasiswa, yakni; *Instrumental* berarti menjadikan kekerasan sebagai alat untuk mencapai tujuan/kepentingan. Hal ini menjadi mungkin dilakukan karena tidak adanya saluran-saluran yang dapat mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mahasiswa, walaupun saluran-saluran telah tersedia berarti ada persoalan yang mengakibatkan tidak bekerja maksimal. *Konstitutif* berarti menempatkan kekerasan sebagai tindakan penegasan identitas mahasiswa. Mereka tidak mempersoalkan ada atau tidaknya saluran untuk menunjukkan eksistensi identitasnya, namun hanya dengan kekerasan identitas mereka menjadi ada.

V.2.1. Deskripsi Kekerasan Mahasiswa di Makassar

Selama kurun waktu 1992 -2011 intensitas kekerasan yang melibatkan mahasiswa di Makassar menunjukkan angka yang mencengangkan (Lihat Grafik 1). Baik kekerasan antar kelompok mahasiswa maupun kekerasan mahasiswa dengan actor-aktor lain seperti masyarakat, aparatur kepolisian, dll. Tingginya intensitas kekerasan yang dilakukan mahasiswa di Makassar tentu tidak hanya meresahkan masyarakat sekitar yang sering dirugikan karena kekerasan tersebut, melainkan kekerasan ini telah meresahkan pemerintah sebagai pelaksana dan penjaga ketertiban dan keamanan.

Grafik 1: Frekuensi Kekerasan di Makassar



Sumber: Diolah dari Database Polda Sulawesi Selatan

Dalam catatan kekerasan yang melibatkan mahasiswa di Makassar terdapat beberapa peristiwa besar yang sampai saat ini masih melekat dalam memori kolektif mahasiswa. Diantaranya adalah peristiwa April Makassar Berdarah di tahun 1996.

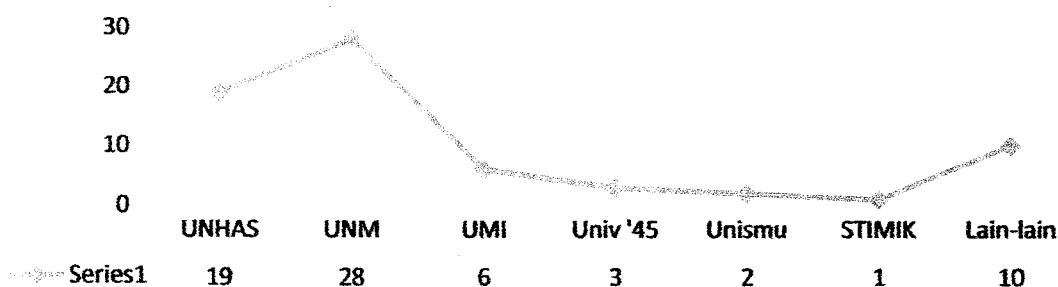
Peristiwa ini diawali dengan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa di hampir semua universitas di Makassar. Demonstrasi ini ditujukan untuk memprotes kebijakan walikota Makassar Malik B Masry yang menaikkan angkutan kota (pete-pete), presentasi kenaikannya pun tidak tanggung-tanggung mencapai angka 70%. Bagi mahasiswa, kebijakan itu sangat memberatkan dan membuat semakin terpuruknya ekonomi masyarakat, maka dari inilah muncul gelombang protes mahasiswa Makassar dalam merespon kebijakan pemerintah. Untuk merespon kenaikan tersebut digelar aksi demonstrasi besar-beasaran oleh mahasiswa Makassar. Aksi demonstrasi ini terjadi secara terus menerus dari tanggal 22 April 2011 dan mencapai puncaknya tanggal 24 April 2011. Pada awalnya aksi demonstrasi dilakukan secara damai dengan menggelar mimbar-mimbar bebas di dalam kampus. Pada tanggal 23 April 1996 Mahasiswa UMI menggelar aksi spontan dengan membajak mobil Damri di Jalan Urip Sumoharjo. Pukul 13.30 siang Aparat keamanan dari kepolisian datang dan segera membentuk pagar betis, kemudian terjadi dialog antara mahasiswa dan pihak kepolisian. Sesaat setelah dialog tersebut, datang satu truk aparat keamanan dari Garnisun dan membentuk pagar betis di belakang aparat kepolisian dan memaksa mahasiswa untuk mundur dan masuk kedalam kampus. Aparat keamanan merengsek dan menyerbu masuk ke dalam kampus sambil melakukan aksi pemukulan dan menembakkan gas air mata. Aparat keamanan juga merusak berbagai fasilitas kampus serta ratusan kendaraan roda dua dan satu kendaraan roda empat. Pada hari yang sama Pukul 16.00 sore Aparat keamanan mundur atas instruksi Kasdam VII Wirabuana Brigjen Pahrul Rosi dan mengadakan dialog dengan mahasiswa. Rabu, 24 April 1996 Pukul 10.00 pagi Mahasiswa kembali melanjutkan aksi di depan kampus dengan menahan sebuah mobil pengangkut sampah sebagai bentuk kemarahan dari aksi masuk kampus dari aparat keamanan. Pagi itu 2 orang anggota ABRI di hadang dan dipukuli oleh mahasiswa Pukul 13.25 siang Aparat keamanan dari kesatuan kavaleri tiba di depan pintu kampus lengkap dengan persenjataan dan tiga panser. Mereka kemudian masuk menyerang mahasiswa ke dalam kampus sementara mahasiswa mencoba menahan aparat masuk lebih jauh. Mahasiswa terdesak dan sebagian menyelamatkan diri lari ke dalam laboratotium dan ratusan mahasiswa lari ke tepi sungai

pampang. Aparat kemudian mengejar mahasiswa yang berada di tepi sungaiampang kemudian memukul dengan beringas. Sebagian mahasiswa mencoba menyelamatkan diri dengan cara melompat ke sungai, tapi pada dasar sungaiampang terdapat Lumpur setinggi 1 meter dan kedalaman kurang lebih 4 meter dengan arus bawah yang deras. Pukul 18.15 malam Seorang mahasiswa tanpa identitas ditemukan sekarat dan dibawa ke RS 45. kemudian seorang mahasiswa tak bernyawa di temukan dengan posisi kepala sampai pinggul terbenam di Lumpur. Pukul 07.00 pagi Mahasiswa berusaha masuk ke kampus dengan segala cara karena diyakini masih ada korban yang belum ditemukan Pukul 08.15 pagi Mahasiswa dan masyarakat mencari korban dengan cara menyelam Pukul 09.00 Kembali seorang korban tak bernyawa di temukan dan ternyata dia adalah Andi Sultan Iskandar. Pukul 12.45 WITA.- Mayat disemayamkan di rumah sakit 45 dengan ambulance kecepatan lambat dan sekitar 100 mahasiswa berjalan kaki. Pukul 13.00 WITA. Masyarakat menemukan lagi M. Tasrif dengan luka dibagian muka dan badannya. Korban di semayamkan di Rumah Sakit 45 dan menuju kerumah duka. Melewati kantor gubernuran dan melakukan tindakan anarkis. Membakar tiga kendaraan aparat keamanan dan menggulingkan tiga tiang listrik. 26 april 1996 Pukul 6.00 Aparat keamanan menguasai kampus, mahasiswa tidak bisa masuk kampus tidak ada aktifitas perkuliahan. Identifikasi korban Syaiful bya, umur 21 tahun, mahasiswa teknik arsitektur umi 94 alamat, BTN paropo blok D 10/9 makassar meninggal disungaiampang, pada hari rabu 24 April 1996,. Pukul 18.15 malam dengan luka memar di bagian dada dan belakang seperti bekas pukulan. Di kebumikan, 25 april 1996 di gorontalo. Andi Sultan Iskandar umur 21 tahun, mahasiswa fakultas ekonomi akuntansi, angkatan 1994. Alamat jl. Sukariya 1 No.77 Makassar. Meninggal dengan luka pada dada bagian kiri bekas tusukan benda tajam. Wajah, jidat, kepala, dada dan punggung memar dan bengkak bekas pukulan benda keras. Jenasah dikebumikan di kuburan dadi Makassar pada hari jum'at 1996 pada pukul 13:00 WITA. Tasrif, umur 21 tahun, mahasiswa fakultas ekonomi studi pembangunan, angkatan 1994. Alamat Jl. Tidung VII/Stp VII/No. 55 Perumnas Makassar. Dianiaya oleh aparat keamanan dengan benda keras yang mengakibatkan kematian kemudian ditenggelamkan di sungaiampang. Mayatnya ditemukan dengan

.luka bekas tusukan benda tajam pada leher sebelah kanan, pada wajah dan tubuhnya terdapat luka memar dan bengkak.²

Intensitas kekerasan mahasiswa di Makassar mengalami kenaikan di tahun 2003 (Lihat Grafik 1). Menurut catatan dari data base Polda Sul-Sel selama rentang tahun 2003 – 2011 terdapat 60 kekerasan yang terjadi dikalangan mahasiswa, yang terjadi di Sembilan perguruan tinggi di Makassar, yakni; Universitas Negeri Makassar (UNM), Universitas Hasannudin (UNHAS), Universitas Muslim Indonesia (UMI), Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh), Universitas 45, Akademi Ilmu Pelayaran, Timik Dipanegara, Politeknik Negeri Makassar, dan STIEM Bungaya. Dalam Grafik 2 kita bisa melihat dua Universitas Negeri yang ada di Makassar memberikan sumbangan angka yang paling tinggi kasus kekerasannya, yakni UNHAS dan UNM. Tentu sangat memprihatinkan terlebih baik UNHAS maupun UNM adalah dua Universitas yang bisa dikatakan terbesar di Indonesia bagian timur.

Grafik 2: Frekuensi Kekerasan berdasarkan Universitas



Sumber: Diolah dari Database Polda Sulawesi Selatan

Selama kurun waktu 2005 di UNM saja terdapat tiga kasus kekerasan. Peristiwa kekerasan ini terjadi pada tanggal 19 Januari 2005, tawuran yang melibatkan mahasiswa fakultas Bahasa dan Sastra dengan mahasiswa fakultas Teknik. Peristiwa yang kedua

² Kronologi peristiwa AMARAH ini peneliti sadur dan olah dari berbagai sumber, diantaranya Tribun Timur, Pernyataan KOMNAS HAM, dan Media Pers Mahasiswa.

terjadi pada tanggal 1 Oktober 2005 yang melibatkan mahasiswa Fakultas Teknik melawan Fakultas Ilmu keolahragaan. Tidak lama setelah itu terjadi tawuran yang ketiga, meletus pada tanggal 20 oktober 2005, tawuran yang ketiga ini melibatkan lagi-lagi mahasiswa Fakultas Teknik melawan Fakultas Bahasa dan Sastra. Memasuki tahun 2006 di UNM terdapat empat peristiwa kekerasan yang melibatkan mahasiswa sebagai actor utamanya. Peristiwa pertama terjadi pada tanggal 16 Mei 2006, dalam aksi tawuran ini melibatkan mahasiswa Fakultas Teknik dengan sopir angkot *pete-pete*³. Peristiwa kedua yang berbentuk kekerasan aksi mahasiswa terjadi pada tanggal 7 Juli 2006. Kekerasan aksi mahasiswa ini melibatkan gabungan BEM UNM yang terdiri dari BEM FMIPA, FBS, FIP, dan FEIS. Gabungan BEM ini melakukan aksi protes terhadap kebijakan kenaikan SPP yang dikeluarkan oleh Rektorat. Aksi protes ini berujung pada tindak kekerasan antara gabungan BEM UNM dengan Oknum dosen, karyawan dan satuan pengamanan kampus. Tindak kekerasan tidak bisa terelakan dikarenakan mahasiswa melakukan penyerangan dan pengerusakan terhadap gedung rektorat.

Grafik 3: Frekuensi Keterlibatan Kekerasan berdasarkan Fakultas di UNM



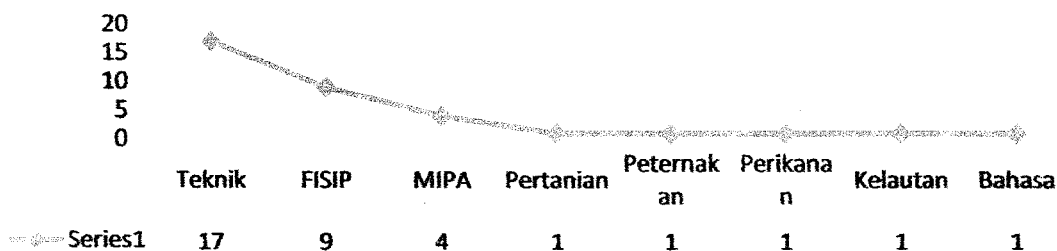
Sumber: Diolah dari Database Polda Sulawesi Selatan

Sedangkan UNHAS pun tidak sepi dari tindak kekerasan yang melibatkan mahasiswa. Terdapat dua fakultas yang bisa diidentifikasi sebagai actor utama kekerasan tawuran antar fakultas di Unhas, yakni fakultas Teknik dan FISIP (lihat grafik 4). Di

³ Pete-pete adalah kendaraan minibus yang dimodifikasi menjadi angkutan umum dalam kota.

tahun 2003 tepatnya tanggal 14 Desember terjadi peristiwa kekerasan dalam bentuk tawuran antar fakultas. Tawuran ini melibatkan dua fakultas yakni Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), yang secara historis keduanya seringkali terlibat dalam aksi tawuran, dengan kata lain dua fakultas ini bisa dikatakan sebagai musuh bebuyutan. Tawuran ini memakan korban tujuh mahasiswa terluka parah dan satu orang dari satuan pengamanan kampus. Kemudian tawuran antar dua fakultas ini berlanjut pada tanggal 13 -14 April 2004. Aksi kekerasan tanpa rekonsiliasi bisa ditebak maka kekerasan tersebut akan meletus lagi, terbukti pada tanggal 31 Agustus 2005 terjadi tawuran lagi yang melibatkan mahasiswa FT dan FISIP, yang mengakibatkan tiga mahasiswa dilarikan di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Tawuran pamungkas di tahun 2005 terjadi pada tanggal 1 September, lagi-lagi melibatkan FT dan FISIP, tercatat dua mahasiswa terluka akibat terkena anak panah.

Grafik 4: Frekuensi Keterlibatan Kekerasan berdasarkan Fakultas UNHAS



Sumber: Diolah dari Database Poldasulawesi Selatan

V.3. Pola Kekerasan Mahasiswa di Makassar

Kekerasan mahasiswa yang tergambar pada tawuran mahasiswa didudukkan peneliti sebagai fenomena tawuran pada umumnya. Ketika kekerasan mahasiswa ini hanya dianggap sebagai fenomena tawuran, maka peneliti lebih leluasa mampu mendudukkan tawuran mahasiswa sebagai fenomena obyektif, dalam artian peneliti tidak akan terjebak dengan *prejudice* kepada mahasiswa. Langkah ini dilakukan peneliti

karena, pertama hanya semata ditujukan untuk mendapatkan gambaran yang utuh terhadap fenomena tawuran mahasiswa, kedua peneliti berupaya untuk tidak terjebak menghakimi mahasiswa. Karena seringkali para pemerhati kekerasan mahasiswa mengawali argumentasinya dengan keprihatinan, menganggap mahasiswa sebagai komunitas intelektual yang tidak seharusnya melakukan tawuran. Hemat peneliti, seorang peneliti haruslah melepaskan diri dari pra anggapan yang cenderung normative atas subyek penelitiannya. Sebab dengan begitu peneliti akan mampu secara jernih menyelami dan menangkap secara utuh fakta di lapangan tanpa terdistorsi oleh pra anggapan tentang identitas subyek kajiannya. Sepertihalnya seorang dokter bedah anatomi tubuh manusia yang selalu mendudukan tubuh (*jasad*) yang akan dibedahnya tidak berbeda dengan tubuh manusia yang lainnya. Singkatnya tubuh dari perempuan cantik sedunia dengan perempuan jelek sedunia memiliki status yang sama dimata dokter bedah anatomi.

V. 3. 1. OSPEK dan Pembentukan Identitas Kelompok

Prasyarat untuk terbentuknya solidaritas kelompok adalah terbentuknya kelompok terlebih dahulu. Sedangkan untuk membentuk kelompok harus ada simbol-simbol komunal yang menyatukan identitas individu-individu, sehingga individu yang sejatinya terpisah dan spesifik tersebut mempercayai bahwa mereka berbagi identitas yang sama. Kepercayaan berbagi identitas yang sama tersebut berlanjut pada hubungan saling timbal balik, kesadaran untuk saling tolong menolong dan pada level afeksinya terdapat hubungan yang saling pengaruh-mempengaruhi. Seperti yang diungkapkan oleh Wakil Dekan 1 FISIP Unhas, tiap jurusan dan fakultas memiliki simbol-simbol khusus yang mereka bentuk:

di fakultas teknik itu ada jurusan biologi yang punya tradisi tertentu kadangkala dikaitkan dengan kebiasaan pada departemennya. Misalkan tradisi akademisnya yang sering ke daerah-daerah, mereka memiliki ciri khusus dalam berpenampilan dan dilekatkan dengan identitas jurusan. Akhirnya mereka membangun kebiasaan-kebiasaan yang spesifik di kampus. Misalnya kalau bapak, bisa menunggu sampai sore boleh jadi

ntar sore akan ada mahasiswa yang lari keliling kampus berteriak-teriak, nah itu mahasiswa biologi, pak.⁴

Dengan melakukan aktivitas bersama merupakan suatu instrument kelompok mahasiswa untuk mengatur tindakan-tindakan anggota-anggotanya. Internalisasi nilai-nilai yang diyakini baik oleh kelompok kedalam diri individu dalam interaksinya dengan anggota kelompok yang dianggap lebih senior, pada akhirnya membentuk kepribadian individu tersebut. Alhasil kepribadian yang terbentuk dari pola interaksi kedalam kelompok menghasilkan pola pikir maupun cara pandang tentang kebaikan dan keburukan sesuai cara pandang kelompok tersebut. Lebih lanjut Bapak Ramli menuturkan:

Nah seperti begitu itu. dia punya kebanggaan seperti itu dan ada beberapa symbol-simbol yang melekat pada mereka, yang mereka tanda kutip seperti mereka kultuskan. Misalnya ada syalnya itu harus memiliki motif tertentu. Pernah juga ada saya dengar konflik permasalahan syalnya diapakan, mereka tersinggung akhirnya terjadilah konflik.⁵

Aktifitas bersama dan pemakaian atribut-atribut kelompok merupakan bagian dari proses sosialisasi yang didalamnya terdapat pemahaman identitas apa yang disebut sebagai “kami”-nya (*we*) dan apa yang disebut sebagai “mereka”-nya (*they*). Identitas kelompok yang diyakini sebagai *we* adalah *in-group*-nya.

Di level fakultas, pengenalan tentang identitas kolektif fakultas juga dilakukan. Medium sosialisasinya adalah kegiatan orientasi dan pengenalan kampus atau yang biasa dikenal sebagai OSPEK. Dalam Ospek pertama kali junior atau mahasiswa baru berinteraksi dengan kakak kelasnya atau senior. Dan seringkali pertemuan antara junior dan senior ini diwarnai dengan seremoni yang mempraktekan tindak kekerasan baik itu verbal maupun fisik. Dengan dalih untuk memperkuat ikatan solidaritas satu angkatan dan melanggengkan tradisi fakultas praktek Ospek sampai sekarang masih dipraktekan di beberapa Universitas di Indonesia, tentu dengan derajat kekerasan yang bervariasi. Relasi yang tidak setara antara junior dan senior dalam Ospek merupakan “simulasi” dari

⁴ Wawancara dengan Pak Ramli Dosen Sosiologi, UNHAS pada tanggal 20 Juli 2011 di Kampus UNHAS, pukul 10.00 WITA.

⁵ *ibid*

bentuk relasi kekuasaan sewenang-wenang. Dalam Ospek seolah-olah senior memiliki kekuasaan yang legitimate, sehingga sah untuk menggunakan kekuasaan tersebut, bahkan dalam bentuk kekerasan sekalipun. Argumentasi yang dibangun oleh senior maupun panitia Ospek untuk membenarkan Praktek kekerasan dalam Ospek adalah, ketika senior mempraktekkan penindasan pada junior itu hanya “simulasi” yang ditujukan untuk membangun solidaritas internal angkatan mahasiswa baru, karena dengan perasaan senasib dan sepenanggungan tersebut mahasiswa baru akan lebih solid. Hal demikian diperjelas oleh PakArmy:

data yang di kemukakan oleh rektor ketika dia menjadi direktur gawat darurat, setiap ospek minimal 80 orang masuk di gawat darurat, tiap hari. Bahwa apa itu bukan bukti kekerasan? Ada yang patah, ada yang pingsan, ada yang luka, yang pasti kurang lebih 80 orang, berdasarkan catatan rumah sakit gawat darurat. Atas 2 dasar itu, rector mengatakan ini bukan pembinaan kemahasiswaan ini, jadi pak rector mengatakan saya setuju pembinaan kemahasiswaan, tapi saya tidak setuju dalam bentuk ospek, dan akan melakukan pembinaan kemahasiswaan tapi bukan dalam bentuk ospek.⁶

Ospek yang pada awalnya ditujukan untuk memberikan pengenalan kehidupan kampus sekaligus tradisi akademik dalam kampus, malah berubah menjadi ajang perpeloncoan sekaligus menjadi ajang sosialisasi kekerasan didunia kampus kepada mahasiswa baru. Jika dulu para senior yang diospek (‘merasakan penderitaan’), maka kini mereka membalaskan rasa ‘sakit hatinya’ kepada junior yang baru masuk, dan hal tersebut membentuk suatu ‘mata rantai’ (senior-junior-dan seterusnya) yang tidak pernah putus. Sehingga dikatakan bahwa ospek sesungguhnya tidak lebih pewarisan budaya premanisme/militerisme di lingkungan kampus.

Dom Helder Camara⁷ merumuskan teori spiral kekerasan, teori ini menjelaskan bahwa kekerasan lahir dari kekerasan sebelumnya, semacam rantai atau spiral kekerasan.

⁶ Wawancara dengan Prof. Dr. Armin Arsyad. M.Si. Wakil Dekan 1 FISIP UNHAS pada tanggal 4 Mei 2011

⁷ Helder Camara merupakan seorang uskup sekaligus aktivis anti ketidakadilan yang dinominasikan mendapatkan hadiah nobel di tahun 70an. Menurutnya sumber dari segala kekerasan adalah adanya ketidakadilan, terlebih yang diakibatkan ketidakadilan distribusi kenikmatan ekonomi. Menurut Camara

Pertama adalah adanya kekerasan yang dilakukan oleh senior sebelumnya lalu diteruskan ke generasi berikutnya. Maka dari itu kekerasan akan terus berputar-putar dalam lingkaran itu. Untuk memutus rantai itu, Camara menerapkan gerakan tanpa kekerasan.

V. 3. 2 Fanatisme Korps: Pilahan *We are* dan *They are*

Kekerasan mahasiswa di Makasar ketika masa Ospek bukan hanya terjadi antara senior dan junior melainkan kekerasan ini seringkali juga menjadi tawuran antar fakultas. Ospek selain menjadi ajang perpeloncoan, juga dijadikan sebagai ajang sosialisasi identitas kelompok (“fakultas”). Kegiatan ospek menjadi kegiatan yang ditujukan untuk menegaskan identitas “*we*”, sehingga target dari kegiatan tersebut adalah munculnya *in group feeling* yang kuat bahkan melahirkan fanatisme kelompok. Karena itu Ospek yang dilakukan tiap fakultas memiliki seremoni atau ritual yang berbeda-beda, tetapi memiliki pesan yang sama untuk disampaikan ke juniornya yakni mitos kebesaran fakultasnya dibanding fakultas yang lain. Tiap fakultas juga memiliki scraf dengan warna yang dianggap representasi dari identitas fakultasnya, warna scraf tersebut didudukan seperti halnya panji-panji yang dimiliki oleh bala tentara ketika berperang.

Fanatisme korps merupakan hal yang ingin dicapai dalam kegiatan Ospek, rasa bangga terhadap korps tentu pada nantinya akan melahirkan segregasi dalam tubuh mahasiswa, dalam konteks ini adanya segregasi antar fakultas. Ospek seperti halnya pisau yang bermata dua, Ospek mampu membuat kohesi internal semakin kuat, akan tetapi Ospek secara langsung juga menciptakan liyan (*they*) sebagai lawan. Tidak jarang fanatisme fakultas ini berujung pada uji nyali mahasiswa baru, dengan cara mencari gara-gara dengan fakultas yang dianggap musuh (*they*).

Tawuran mahasiswa di UNHAS karena sentimen fakultas seperti FISIP dengan Teknik, Teknik dengan MIPA, teknik dengan beberapa fakultas lainnya, Teknik jadi musuh bersama. Alasan mahasiswa tawuran itu karena pertama, sentimen fakultas. Kedua, solidaritas individu. Ketiga ingin merubah atau mengkritik fasilitas yang kurang bagus. Keempat, merubah tatanan sosial.....mahasiswa Geologi ada cirinya yaitu simbol scraf ditaruh kantung belakang dan dikeluarkan sedikit. Mahasiswa

jalan utama untuk memerangi kekerasan adalah dengan tindakan yang damai dan tanpa kekerasan. Lebih lengkapnya baca Helder Camara dalam karyanya *Spiral Of Violence*, Sheed and Ward Stagbooks, 1970.

Geologi tiap sore selalu lari-lari mengelilingi kampus, alasannya karena jurusannya menuntut fisik yang kuat. Motto Fakultas Teknik "we are the champions" dan menilai di UNHAS ini cuma ada tiga fakultas, fakultas teknik, fakultas pascasarjana dan fakultas lain.⁸

Pada momen Ospek ini, dengan leluasa senior memberikan asupan doktrin kepada juniornya (mahasiswa baru). Doktrin negatif dari senior tentang simbol-simbol fakultas menjadi salah satu faktor penyebab konflik yang terjadi di Universitas – Universitas di Makassar. Ospek itu pula yang menjadi ruang-ruang aktualisasi mahasiswa, sehingga terkadang ada senior yang berlebihan dengan melakukan perplonconan pada mahasiswa baru. Hal ini dikarenakan para mahasiswa baru tidak diperlakukan seperti manusia sehingga ketika mereka mau melawan mereka semakin diperlakukan tidak manusiawi jadi jalan satu-satunya bagi mahasiswa baru adalah mereka harus menuruti apa yang diperintahkan oleh seniornya. Hal inilah yang kemudian membentuk perilaku dari para mahasiswa baru yang pada dasarnya adalah orang-orang yang buta pada permasalahan yang terdapat di Universitas - Universitas Makassar. Bahkan tidak jarang, Ospek juga dijadikan ajang pembuktian loyalitas maba terhadap "korps-nya" dengan unjuk keberanian. Seperti yang diutarakan oleh Ishak Rahman ketika wawancara dengan peneliti;

Pada Moment Ospek pula mereka diberikan materi-materi yang salah satu materinya adalah melakukan orasi di tengah-tengah teman mahasiswa yang lain, isi orasinya adalah mengecam salah satu fakultas yang menjadi lawan mereka selama ini. Hal itu yang dapat memicu terjadinya konflik karena sejak awal mahasiswa didoktrin oleh seniornya untuk menjadi lawan dari fakultas lain dan ternyata doktrin ini berjalan difakultas lain sehingga menumbuhkan potensi terjadinya konflik antar mahasiswa.

Pada titik ini, mahasiswa telah mengembangkan tradisi kelompok yang di wariskan kepada juniornya. Secara tidak langsung junior telah dikader oleh seniornya, kaderisasi yang lebih didasarkan nilai-nilai dogmatik dan jauh dari rasio kritis maupun dari akal sehat. Dogmatika ini yang pada nantinya membentuk rasa superior dibandingkan kelompok (fakultas) lain, bahkan senior juga mewariskan rasa benci dan

⁸ Wawancara dengan Pak Ramli Dosen Sosiologi, UNHAS pada tanggal 20 Juli 2011 di Kampus UNHAS, pukul 10.00 WITA.

dendam terhadap fakultas lain. Solidaritas kelompok yang terbangun mengakibatkan melemahnya semangat solidaritas di level perguruan tinggi.

Bisa dikatakan Ospek digunakan sebagai media untuk mereproduksi kekerasan. Layaknya dalam olahraga lari estafet, senior seolah-olah berkewajiban untuk memberikan dendam kelompok tersebut kepada adik-adiknya yang lebih muda. Sehingga, memori kekerasan selalu tertancap dalam memori kolektif kelompok. Bahkan seringkali, pemicu tawuran antar fakultas disebabkan dengan hal-hal yang sepele.

...jadi untuk melihat akar persoalannya sudah susah ditelusuri,... meskipun pola pemicunya sederhana ketersinggungan, senggol, motif cewek, ya boleh kita katakan kalau dalam teori sosiologi apa ya? dari aksi individu menjadi aksi kolektif, jadi dari perilaku individu menjadi perilaku kolektif, karena kenapa.. Karena Sudah ada biangnya semuanya bahkan hal-hal yang tidak jelas saja, katakanlah begini saya di fakultas ini duduk-duduk rame tiba-tiba ada yang naik motor kencang dan suaranya besar kalau sudah lewat di depan saya diotaknya itu, oh iya dari fakultas sebelah itu⁹

Selain untuk menegaskan identitas kelompok, ospek juga menjadi instrument untuk melakukan stereotyping terhadap fakultas yang lain. Dalam konteks universitas di Makasar seringkali tawuran antar fakultas melibatkan fakultas teknik (lihat tabel 2). Dalam table 2 menunjukkan secara konsisten kehadiran Fakultas teknik sebagai peserta tawuran dalam ketiga universitas yang berbeda. Bahkan dalam beberapa kasus, seperti halnya di Universitas Hasanuddin Fakultas Teknik menjadi musuh bersama Fakultas yang non teknik, sehingga pilahannya Fakultas Teknik (Eksak) Vs Fakultas Non Teknik (Sosial)¹⁰.

Dari pengamatan saya yang tawuran konsisten dua fakultas itu, di fakultas bahasa, seni dan fakultas teknik, itu terus, akhirnya pada saat saya meneliti fokusnya kesitu, saya hanya melihat itu hanya dendam antar dua fakultas, ini berlangsung lama sekali¹¹

⁹ Wawancara dengan Wakil Rektor III UNM Prof Iman Suyitno

¹⁰ Lihat juga grafik 3 dan 4 untuk mendapatkan gambaran intensitas keterlibatan Fakultas Teknik dalam tawuran antar fakultas.

¹¹ opcit

Tabel 2. Frekuensi Tawuran Mahasiswa di Makassar Tahun 2000 -2008

Waktu	Universitas	Tawuran Antar	Korban/kerusakan
8/2000	Universitas Negeri Makassar	Fak. Teknik x Fak. Bahasa dan Seni	Rusaknya secretariat BEM Fak. Bahasa dan seni
17/5/2001	Universitas Hasanuddin	Fak. Teknik x FMIPA	5 orang terluka, 2 kelas perkuliahan dan laboratorium terbakar
10/10/2002	Universitas Negeri Makassar	Fak. Teknik x Jurusan Geografi	1 orang terluka tusukan senjata tajam dan sekretaria himajur geografi rusak berat
19/7/2003	Universitas Negeri Makassar	Fak. Teknik x Fak. Ilmu Keolahragaan	2 orang terluka lemparan batu
12-13/5/2003	Universitas Negeri Makassar	Fak. Teknik x Fak. Bahasa & Seni	1 orang mahasiswa lengannya hamper putus dan kerusakan gedung, kantin, laboratorium
1/9/2005	Universitas Hasanuddin	Fak. Teknik x FISIP + Fak. Non Eksak	2 mahasiswa terluka
9/2005	Universitas Muslim Indonesia	Fak. Teknik x MAPALA	2 mahasiswa meninggal dan 10 mahasiswa luka
10/2005	Universitas Muslim Indonesia	Fak. Teknik x MAPALA	9 mahasiswa diamankan
3/5/2006	Universitas Negeri Makassar	Mahasiswa Pro x Kontra Penyesuaian Tarif SPP	Kaca Gedung Rektorat pecah, 6 mahasiswa ditahan
20/11/2006	Universitas Negeri Makassar	Fak. Teknik x Fak. Bahasa & Seni	3 terluka dan 2 gedung perkuliahan rusak
2/2008	Universitas Hasanuddin	Fak. Teknik x FISIP	9 terluka lemparan batu

Tabel diolah dari sumber: Data Base Polda Sulawesi Selatan dan Disertasi Bapak Jumadi, *Tawuran Mahasiswa (Studi Dinamika Konflik Sosial di Makassar)*

Fenomena ini menunjukkan adanya *stereotyping* keilmuan dalam pemahaman mahasiswa memandang ragam ilmu. Pandangan adanya tradisi ilmu yang lebih superior dibandingkan dengan ilmu lain menjadikan perasaan fanatisme yang berlebihan terhadap fakultasnya. Ilmu bukan didudukan sebagai instrument untuk menemukan kebenaran atau ditujukan sebagai instrument untuk berkarya dan mengabdikan bagi kepentingan peradaban, melainkan ilmu digunakan hanya sebagai mitos yang menyatukan kelompok untuk mengibarkan panji-panji perbedaan dan permusuhan. Seorang informan mengatakan:

Jadi saya berani menulis ini solidaritas yang salah kaprah, pokoknya klo sudah masuk, fakultasku yes fakultas lain no fakultasku yes, lalu saya bertanya siapa yang bener, siapa yang salah, yang salah juga mengatakan dirinya bener, disini juga mengatakan bener saya katakana kesimpulan saya yang salah adalah kedua-duanya karena tindak kekerasan¹²

Pada tabel 2 juga terlihat frekuensi kemunculan tawuran antar Fakultas meningkat pada bulan Juni – September. Jika frekuensi kemunculan tersebut di kroscek dengan jadwal Ospek maka akan bertemu pada bulan September. Peneliti menyimpulkan Ospek dan kekerasan mahasiswa yang berupa tawuran merupakan dua aktifitas yang seiring dan sejalan. Dalam artian Ospek juga memiliki kontribusi untuk terus menyalakan api semangat mahasiswa melanggengkan “tradisi” tawuran tersebut. Hal demikian dipertegas oleh seorang informan yang mengatakan:

dari 2006 sampai 2008 itu ya, dicatetan saya saja itu sampai lebih 10 kali terjadi konflik itu dan waktunya itu retan terjadi waktu penerimaan mahasiswa baru, pada saat penerimaan mahasiswa baru Disitulah terjadi konflik¹³

Pada bulan Juni-Agustus adalah masa persiapan penerimaan mahasiswa baru, sudah menjadi tradisi para senior untuk mempersiapkan kegiatan penyambutan bagi mahasiswa baru. Persiapan yang dilakukan para senior ini seringkali berakhir dengan perselisihan dengan panitia penyambutan dari fakultas lain, karena berebut untuk *marking* tempat kegiatan. Perebutan tempat atau dalam bahasa mahasiswa Makassar

¹² ibid

¹³ ibid

disebut sebagai “teritori” menjadi sangat penting. Karena teritori menjadi bagian penting dari penegasan eksistensi dan superioritas “fakultas”. Memasuki bulan September awal merupakan jadwal pelaksanaan Ospek, akan tetapi titik rawan tawuran hingga bulan Desember, ini dikarenakan adanya kegiatan pasca Ospek yang dilakukan oleh para senior dan para alumni. Internalisasi doktrin yang cukup lama dan intensif dari senior maupun alumni ini pada nantinya melahirkan fanatisme korps. Semakin terbentuknya solidaritas yang kuat diantara mereka, secara tidak langsung akan menimbulkan sikap agresifitas yang tinggi (Eron, 1987).

V.2.3 Reproduksi Kekerasan Dalam Dunia Kampus

Kekerasan komunal antar mahasiswa yang terjadi tidak selalu disebabkan oleh seting social, melainkan dikarenakan kekerasan komunal itu sendiri. Sehingga kekerasan komunal tersebut bisa diartikan sebagai tindak agresifitas kolektif untuk memuaskan emosi-emosi komunal dan ego kelompok, seperti halnya menegaskan eksistensi kelompoknya sebagai kelompok yang lebih superior, tindakan agresif karena balas dendam atas memori kemarahan masa lalu. Tidak berlebihan jika peneliti mengatakan kekerasan mahasiswa menjadi semacam “tradisi” lanjutan dari masa lalu maupun peristiwa yang sebelumnya. Jika ini menjadi tradisi maka ada seperangkat regulasi dan instrument untuk mensosialisasikan-nya kepada warga kelompok yang baru bergabung (mahasiswa baru). Maka rekomendasinya adalah memotong jalur reproduksi tersebut beserta instrument sosialisasinya. Fenomena kekerasan seperti ini yang menurut Johan Galtung (1978) memiliki mekanisme *self reinforcing*¹⁴ untuk membentuk kekerasan lainnya.

Salah satu aktivitas mahasiswa untuk terus mereproduksi kekerasan kolektif adalah dengan mengadakan kegiatan seremonial yang tujuannya untuk memperkenalkan kepada adik-adik mahasiswa baru (junior) tentang sejarah kekerasan yang pernah dialami fakultasnya, senior dengan segala argumentasi pembenaran menegaskan kepada junior

¹⁴ Kekerasan yang tidak memerlukan rujukan seting social tertentu, melainkan kekerasan yang didalam dirinya telah memiliki segala kebutuhan untuk melahirkan kekerasan baru, yang dibutuhkan hanyalah trigger (pemantik) yang seringkali cukup hanya pemantik yang sepele.

untuk mengemban tanggung jawab kehormatan fakultas. Tanggung jawab yang diartikan sebagai tindakan balas dendam maupun tindakan agresif lainnya. Seremoni tentang peristiwa kekerasan diperingati bukan untuk mengenang betapa buruknya peristiwa tersebut dan jangan sampai terjadi lagi, melainkan peringatan yang tiap tahun diselenggarakan tersebut maiah untuk selalu *refresh* (menyegarkan) kembali memori kolektif tentang siapa musuh yang sebenarnya, atau ada dendam yang harus diselesaikan. Di Universitas Hasanuddin ada peringatan yang disebut sebagai *Black September*. Peristiwa black September adalah peringatan terhadap kejadian tawuran mahasiswa di tahun 1992, antara mahasiswa Fakultas teknik melawan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik dibantu dengan fakultas non eksak lainnya. Tawuran ini berakhir dengan terbakarnya gedung fakultas teknik dan empat mahasiswa dijebloskan ke penjara selama dua tahun. Di Universitas Negeri Maksiar juga ada seremoni serupa yang dikenal dengan Dentum (Dendam Tujuh belas Mei).

Peringatan terhadap kekerasan sekali lagi tidak dijadikan sebagai cerminan buruk (*looking glasself*) dan berupaya untuk menarik hikmah dibalik kejadian tersebut. Melainkan, peringatan tersebut digunakan sebagai ajang pengkaderan oleh para senior untuk tidak pernah melupakan kejadian yang pernah melanda fakultasnya. Bentuk-bentuk peringatan seperti *black September* dan Dentum ini seperti halnya *time capsule* yang selalu merawat memori masa lalu. Dilihat dari waktu peristiwa tersebut terjadi tentu actor-aktor yang terlibat aktif dalam peristiwa tersebut sudah meninggalkan kampus dan menjadi alumni, akan tetapi amarah dan dendam dari peristiwa tersebut masih tetap ada dan menjadi memori fakultas. Padahal pada tahun 1992, para mahasiswa baru di tahun 2000-an sama sekali tidak memiliki kepentingan keberpihakan pada konflik tersebut, akan tetapi ketika mereka masuk ke fakulas yang bertikai, seketika itu peristiwa ditahun 1992 yang sama sekali tidak terkait dengan dirinya menjadi sejarah identitas barunya. Sejarah kelompok yang harus dia bela.

Gambar 3. Senjata Yang Digunakan Oleh Mahasiswa Dalam Tawuran



Sumber: Tribun Timur, 23 September 2008

Menurut Eller (1999) sejarah masa lalu adalah energy bagi masa kini, maksudnya sejarah bukanlah sekedar masa lalu dari kelompok, tetapi sejarah juga bisa menjadi kekuatan yang meggerakan kelompok tersebut, bahkan sejarah juga digunakan sebagai dasar pembenar untuk bertindak. Singkatnya, sejarah adalah energy yang selalu hadir dalam situasi kekinian. Pengenalan dini terhadap masa lalu dari interaksi antar fakultas yang tidak harmonis, secara langsung mampu memepengaruhi pola interaksi mahasiswa baru dengan rekan sesame mahasiswa barunya di fakultas lain. Sosialisasi masa lalu ini juga mempengaruhi pola perilaku mahasiswa sehingga menimbulkan ketegangan social dalam interaksi mahasiswa, berikutnya sedikit saja pemicu akan meledakan ketegangan tersebut menjadi kekerasan.

V. 2. 4. Asrama Mahasiswa dan Romantisme Kedaerahan

Asrama daerah adalah asrama yang di bangun oleh Pemerintah daerah untuk putra daerahnya yang sedang menempuh kuliah di luar daerah. Bagi sejumlah orang, kehidupan asrama adalah kehidupan yang eksklusif. Ada anggapan warga asrama hanya mau berbaur dengan orang yang berasal dari daerah yang sama. Hal ini membuat terjadinya sumbatan komunikasi antarmahasiswa daerah. Bagi cita-cita kebangsaan kita tentu ini menjadi problem, maka asrama daerah-pun harus mendapatkan sentuhan regulasi ketika kita membincang kekerasan mahasiswa. Harapannya terbangunnya kembali komunikasi

antar mahasiswa, baik berbasis ilmiah maupun kultural, sehingga masing-masing pihak bisa memahami keragaman kultur masyarakat daerah lain.

Tidak bisa dipungkiri, otonomi daerah juga membawa eksese negative. Salah satunya adalah penguatan identitas cultural, etnis¹⁵, maupun kelompok. Kelemahan ini termaktub dalam klausul syarat untuk membentuk daerah otonom baru melalui pemekaran, klausulnya mengharuskan adanya historisitas yang mengikat daerah tersebut. Ikatan historis ini merujuk pada suku, sejarah pemerintahan lama, dsb. Alhasil semangat ikatan-ikatan yang spesifik inilah yang pada akhirnya membawa otonomi daerah kepada semangat eksklusifisme kedaerahan. Celakanya semangat ini pula yang mengilhami berdirinya asrama-asrama daerah dan semakin memperkuat identitas-identitas local dari masing-masing mahasiswa. Fanatisme identitas kelompok yang berujung pada primordialisme inilah yang menimbulkan apriori terhadap kelompok lain.

Asrama bukanlah sebuah kotak yang membentengi sikap primordialisme dan mempersempit rasa nasionalisme, tetapi justru merupakan jembatan untuk memahami kebudayaan daerah lain, mengingat asrama juga sebagai organisasi sehingga lebih mudah untuk membentuk pemahaman ini dibanding mengumpulkan mahasiswa yang masih indekos, misalnya. Tidak jarang terjadi bentrok antar asrama daerah, maka penting untuk menata ulang visi organisasi asrama daerah, apakah ingin tetap sebagai tempat tinggal, mempertahankan sekat feodalisme dan primordialisme, atau menarik pelajaran berharga dari serangkaian insiden belakangan ini untuk kemudian menjadi jembatan mengenal kebudayaan lain.

Selain itu pentingnya untuk menciptakan wadah yang mampu merangsang proses integrasi. Kekerasan atas nama etnis akan selalu hadir dalam masyarakat yang pluralistic jika wadah yang integrasinya tidak ada.

V. 3 Demonstrasi dan Kekerasan Aksi Mahasiswa

¹⁵ Etnis dalam penelitian ini didefinisikan sebagai sekelompok penduduk yang memiliki kesamaan sifat-sifat kebudayaan, seperti halnya bahasa, adat istiadat, perilaku budaya, dan sejarah.

Membaca sejarah Indonesia sepertihalnya membaca sejarah pemuda. Karena dalam perjalanan menentukan arah bangsa ini tidak lepas dari keringat dan pikiran yang dicurahkan oleh para mahasiswa. Coba kita tilik sejarah kemerdekaan yang berawal dari Boedi Oetomo, Sumpah Pemuda, sampai proklamasi kemerdekaan tidak lepas dari peran para pemuda. Para mahasiswa dengan gagah berani di baris terdepan untuk meneriakkan perubahan, ketika rezim politik yang ada dianggap sudah tidak berpihak pada kepentingan rakyat, keberanian para mahasiswa untuk menyerukan perubahan tercatat dalam sejarah Indonesia. Rezim politik pertama yang mendapatkan kritik keras dan berujung penggulingan adalah rezim politik Soekarno di tahun 1965. Seolah sejarah terulang di tahun 1998, ketika Soeharto juga digulingkan oleh mahasiswa karena dianggap telah menjadi rezim politik yang korup, otoriter, dan abai terhadap kepentingan rakyat. Elemen mahasiswa dan gerakan mahasiswa harus kita sadari merupakan poros perubahan karena keberadaannya merupakan elit intelektual yang dunianya dipenuhi dengan pengetahuan, keilmuan, buku-buku ataupun tradisi diskusi kritis yang secara sadar atau tidak mempengaruhi terhadap bangunan karakter (*character building*) keterpanggilannya untuk melakukan perubahan sosial.

Dengan dibukanya keran-keran demokrasi pasca tergulingnya rezim Soeharto, semua elemen masyarakat mendapatkan kebebasan sipilnya, salah satunya adalah kebebasan untuk mengemukakan pendapat. Strategi untuk mengemukakan pendapat pun beragam, melalui petisi, menulis opini di media, kritik terbuka di jejaring social, dan yang paling sering dijumpai adalah demonstrasi. Pada dasarnya, demonstrasi adalah hal yang wajar dalam negeri yang demokratis. Katup-katup kebebasan yang dibuka oleh negara bagi elemen-elemen masyarakat telah menyebabkan maraknya demonstrasi yang dilakukan pada momen-momen tertentu. Inilah yang terjadi di Indonesia pasca-reformasi 1998. Akan tetapi tidak jarang demonstrasi yang ada berujung pada tindak kekerasan.

Meminjam analisis Jurgen Habermas, demokrasi yang baik mensyaratkan adanya ruang public yang terbuka, serta dibangunnya saluran-saluran komunikasi multi stage holder untuk melakukan tindakan komunikatif ("*discourse*") (Hardiman, 2009). Akan

tetapi ruang public yang terbuka saja tidak cukup, Negara juga harus mampu melakukan aksi-aksi emansipatoris dengan memastikan semua masyarakat juga mampu mengakses ruang public tersebut, sehingga ruang public tidak didominasi oleh kalangan elite politik dan elite ekonomi semata. Ketersediaan ruang public tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengaksesnya akan berimplikasi pada frustrasi social. Ketika proses-proses politik telah didominasi oleh elite-elite yang terkurung oleh ambisi kekuasaan, demonstrasi menjadi sebuah alternatif untuk menyuarakan kehendak publik. Bagi rakyat yang termarjinalkan, tidak ada jalan lain untuk mengubah keadaan selain turun ke jalan dan berdemonstrasi.

V. 4. 1 Mahasiswa versus Insititusi Kampus

Solidaritas kelompok yang dibangun sejak Ospek tidak hanya berlaku ketika mahasiswa fakultas tertentu berhadapan dengan fakultas lain, akan tetapi solidaritas inipun muncul ketika salah satu anggota kelompoknya sedang memiliki masalah dengan Universitas, misalkan dalam kasus Drop Out. Solidaritas yang tidak pandang bulu ini tentu menyalahi aturan main yang telah ditetapkan oleh insititusi pendidikan nasional.

Sedangkan Motif kekerasan aksi mahasiswa dengan pihak kampus (rektorat) yaitu sebagai bentuk menyalurkan aspirasi terutama. Jika aspirasi mahasiswa tidak di tanggapinya maka mahasiswa cenderung melakukan kekerasan. Seperti protes mahasiswa terhadap fasilitas kampus yang dinilai kurang, mahasisnya bentuk protesnya dengan merusak fasilitas kampus tersebut sehingga mau tidak mau pihak kampus harus memperbaiki fasilitas yang rusak. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Ramli kepada peneliti:

Tawuran mahasiswa di UNHAS karena sentimen fakultas seperti FISIP dengan Teknik, Teknik dengan MIPA, teknik dengan beberapa fakultas lainnya, Teknik jadi musuh bersama. Alasan mahasiswa tawuran itu karena pertama, sentimen fakultas. Kedua, solidaritas individu. Ketiga ingin merubah atau mengkritik fasilitas yang kurang bagus. Keempat, merubah tatanan sosial.....¹⁶

¹⁶ Wawancara dengan Pak Ramli Dosen Sosiologi, UNHAS pada tanggal 20 Juli 2011 di Kampus UNHAS, pukul 10.00 WITA.

Pada fenomena pengerusakan inventaris universitas bisa dikategorikan factor kontingensi yang menggunakan kekerasan sebagai justifikasi instrumental. Instrumental berarti menjadikan kekerasan sebagai alat untuk mencapai tujuan/kepentingan. Hal ini menjadi mungkin dilakukan karena tidak adanya saluran-saluran yang dapat mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mahasiswa, walaupun saluran-saluran telah tersedia berarti ada persoalan yang mengakibatkan tidak bekerja maksimal. Contoh lain pembangkangan dari mahasiswa yang menggunakan justifikasi instrumental adalah ketika mereka melakukan tawuran, itu adalah salah satu bentuk mencari keadilan di luar aturan main (hukum) yang sudah ada, baik merujuk peraturan universitas maupun Undang-undang hokum pidana. Mereka menganggap kawan-kawan mereka yang menjadi korban kekerasan antar mahasiswa tidak mendapatkan keadilan, dikarenakan pelaku kekerasannya tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, maka mereka membuat hokum sendiri dan pengadilan banding sendiri dengan jalan kekerasan.

Jika diamati dari isu yang mahasiswa usung, tidak sedikit yang memang berdasarkan dari pemikiran yang serius, akan tetapi aksi maupun isu yang diusung oleh mahasiswa tersebut menjadi kabur dan terlihat buruk ketika mereka lebih memilih kekerasan sebagai instrument aksinya.

Macam-macam kadang- kadang kompensasi pembayaran, pungutan-pungutan yang salah satu menjadi pemicu kekerasan. Misalkan ada perubahan pada biaya praktikum, praktikum tahun 2010 biayanya 200rb sedangkan Praktikum 2011 naik 300. kadang-kadang juga akreditasi jurusan yang di lakukan oleh di nilai tidak memuaskan juga pemicu kekerasan atau akreditasinya terlambat itu juga sering memicu.¹⁷

V. 4. 2 Mahasiswa Versus Aparat Kepolisian (Negara)

Adanya asumsi Makassar kota yang rawan terjadinya tindak kekerasan, sehingga pengamanan di kota ini dikendalikan oleh 178 Detasemen Khusus (Densus)

¹⁷ Wawancara dengan Pembantu Dekan III Fakultas Ushuludin UIN Sultan Allaudin Makassar Bapak Abdul wahid.

Penanggulangan Anarki bentukan Mabes Polri sebagai implementasi Prosedur Tetap (Protap) nomor 1/X/2010 tentang penanggulangan tindakan anarkis. Detasemen Antianarki juga akan dilengkapi dengan unsur intelijen, deteksi dini, respons, dan prediksi. Sehingga jika ada tindakan kekerasan, detasemen ini siap menangani. Namun, pembentukan detasemen ini dikhawatirkan akan memunculkan dan memperkuat karakter aparat yang represif bila mengamankan aksi massa yang ada di Makassar.

Gambar 4. Bentrokan mahasiswa dan Aparat Kepolisian



Sumber Foto: Fahmi Ali, Majalah Identitas (Pers Mahasiswa Unhas)

Bentrokan antara mahasiswa dan aparat juga seringkali sulit dihindari. Hal ini terjadi karena adanya loyalitas dan fanatisme yang sempit, bentrok antara mahasiswa dengan aparat itu karena adanya fanatisme yang sempit yang satu memiliki kesadaran legitimasi yang satu memiliki kesadaran kritis, dari kajian aparat dan kajian akademis itu sulit ketemu karena dari aparat atau akademik itu bersifat vertikal dari struktur atas ke bawah sedangkan akademik ini senantiasa mengalami proses diskursus. Perlu adanya konsolidasi-konsolidasi gerakan yang bernuansa keilmuan pada tataran mahasiswa. Begitu pula ketika demonstrasi, aparat dan peserta aksi untuk tetap mengkedepankan upaya dialogis dan tindakan persuasif sebagai wujud demokrasi damai di Makassar. Pak Armyun lebih jauh menjelaskan:

Inilah kondisi yang sulit, polisi ditugaskan untuk mengamankan jalannya demonstrasi agar tetap tertib, hanya saja mahasiswa kadang yang tidak tertib, mereka melakukan hal seperti itu sebenarnya untuk memancing pemerintah supaya marah, misalnya dengan membakar ban dan mempersempit jalan, sehingga menyebabkan kemacetan hampir tiga

sampai empat kilometer. Kendaraan-kendaraan lain yang hendak melintas di jalan itu juga akhirnya harus dialihkan ke jalan alternative namun banyaknya kendaraan yang melewati jalan alternative tersebut menyebabkan penumpukan kendaraan sehingga jalan alternative itupun menjadi macet. Kalau polisi dituntut untuk menegakkan peraturan biasanya dilawan oleh mahasiswa. Biasanya kalau mahasiswa demo di depan kampusnya mereka melempari polisi kemudian lari ke dalam areal kampus, jika polisi mengejar mahasiswa-mahasiswa ini maka polisi akan dianggap memasuki area terlarang, kalau hal itu terjadi maka ini akan memicu solidaritas-solidaritas yang lain lagi, misalnya kalau ada mahasiswa yang dipukul, ini akan memicu solidaritas universitas atau bahkan solidaritas dari universitas-universitas lain agar polisi yang memukul itu diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menyebabkan nyali polisi menciut karena adanya ketakutan akan disalahkan. Seperti kasus saat Manggarani menjadi kapolda, karena ada polisi yang dilempari oleh mahasiswa tapi tidak disyuting oleh wartawan, ketika ada polisi membalas memukul mahasiswa itu yang disyuting. Tapi mahasiswa kami tidak pernah melempari polisi karena mereka tahu itu bahaya.¹⁸

Dalam kekerasan aksi mahasiswa yang membawa isu nasional, misalkan kenaikan BBM, Kasus skandal korupsi, dsb. Seringkali mereka menganggap symbol-simbol maupun actor yang lekat dengan Negara adalah musuh. Celaknya polisi sebagai aparaturnya Negara yang sah menggunakan kekerasan, berkewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban sering bersentuhan dengan kekerasan aksi mahasiswa ini. Polisi ketika bertemu di lapangan pada waktu aksi dengan mahasiswa dianggap sebagai musuh dari mahasiswa karena isu yang dibawa adalah kontra Negara. Tidak hanya berhenti di polisi, atribut Negara seperti mobil plat merah sekalipun juga sering menjadi sasaran kemarahan mahasiswa kepada Negara pada saat aksi. Seperti pada waktu demo mahasiswa dari elemen BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) UMI dan Universitas 45 Makassar, tanggal 3 maret 2010, di jalan protokol Urip Sumoharjo Makassar. Mereka menutup jalan protokol ini sejak jam 09.00 WITA sampai 17.00 WITA dengan menggunakan bambo, membakar ban untuk menghalangi pengguna jalan melintas di depan kampus mereka. Di tengah aksi mereka seringkali melakukan aksi sweeping mobil yang berplat merah karena menganggap sebagai kroni SBY. Tentu itu merupakan tuduhan yang tidak beralasan, dalam posisi seperti ini mahasiswa telah gagal membedakan apa itu Negara, aparaturnya

¹⁸ Wawancara dengan Prof. Dr. Armin Arsyad. M.Si. Wakil Dekan 1 FISIP UNHAS pada tanggal 4 Mei 2011

Negara, pemerintah, dan kepentingan politik. Masih dalam peristiwa aksi yang sama, kedua elemen mahasiswa tersebut juga terlibat bentrok dengan iring-iringan masyarakat yang mengantar jenazah, karena iring-iringan tersebut tidak boleh melintas. Seperti yang dilaporkan oleh VIVA News online;

Ditengah-tengah aksi, mahasiswa mencari mobil dinas yang melintas dijalan alternatif disamping jalan utama. Mahasiswa UMI Makassar sepanjang hari ini hanya berhasil menyandera 1 mobil plat merah. Mobil kijang tersebut digunakan oleh pegawai RS Haji Makassar atas nama M. Nirwan. "Saya sama istri mau ke Kantor Gubernur urus soal pasien. Tapi saya tidak menduga akan di sweeping," tutur M Nirwan kepada wartawan Rabu, 3 Maret 2010. Para mahasiswa kemudian menyuruh pegawai RS tersebut naik di atas mobilnya untuk berorasi. Isi orasinya pun diarahkan oleh mahasiswa untuk meminta SBY turun dari jabatannya, serta mendukung kasus Century diproses secara hukum. Mahasiswa sendiri menyandera pengguna mobil plat merah karena menganggap sebagai kroni SBY. Sebelum menyandera mobil dinas, mahasiswa UMI Makassar juga terlibat insiden dengan arak-arakan pengantar jenazah. Kedua pihak tersebut sempat saling lempar beberapa saat. Para pengantar jenazah marah karena mereka tidak bisa melintas akibat pemblokiran jalan yang dilakukan pengunjuk rasa. Untung, puluhan polisi berhasil meredam aksi saling lempar tersebut. Hingga sore ini mahasiswa UMI Makassar tidak memberikan kepastian kapan akan membuka jalan Urip Sumoharjo. Namun untuk gerakan menyikapi Kasus Century, akan tetap berjalan. "Pokoknya hingga SBY, Boediono dan Sri Muliani melepas jabatannya," tegas Ketua BEM UMI Makassar, Hasanuddin Kamal.¹⁹

Bentrokan antara polisi dan mahasiswa di Makassar memiliki sejarah yang panjang. Sudah menjadi memori kolektif mahasiswa, bahwa polisi merupakan musuh dari mahasiswa. Sejarah bentrokan yang paling mengakar dalam memori kolektif mahasiswa adalah peristiwa di tahun 1996. Mahasiswa Makassar menggelar aksi perjuangan atas naiknya BBM yang berimbas pada naiknya biaya angkot dari Rp300 menjadi Rp500 hingga memancing aparat keamanan yang saat itu masih satu payung (Tentara Nasional Indonesia) harus merengsek masuk ke kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan menelan tiga korban jiwa. Masuknya puluhan kompi Polisi ke kampus yang sama dan membabi buta mahasiswa yang walau sedang belajar dianggap pembuat onar (asalkan dia lelaki) dianggap salah. Peristiwa berdarah tersebut sampai sekarang tiap tahunnya

¹⁹ Sumber kutipan dari www.vivanews.com

diperingati dan dikenang sebagai sebagai Hari Amarah (April Makassar Berdarah). Tiap memperingati hari Amarah, tuntutan mahasiswa adalah dilakukannya pengusutan secara tuntas terhadap kasus yang masuk dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dijelaskan oleh Pak Ramli:

kalo di UMI sering diperingati kan kaitannya dengan penembakan mahasiswa. Ah itu memang selalu diperingati. Penembakan mahasiswa, tapi itu kaitannya oleh aparat. Itu juga waktu kalo nggak salah waktu itu kejadiannya di baru juga itu. Waktu itu kapoldanya kan Pak Rabini hampir setiap hari mahasiswa berdemonstrasi.²⁰

Pecahnya bentrokan antara aparat keamanan dengan Mahasiswa di UMI pada waktu itu dipicu oleh aksi mahasiswa yang menyendera mobil tangki bahan bakar minyak. Peristiwa ini juga yang mempengaruhi gaya aksi demonstrasi Mahasiswa sampai saat ini, tiap kali aksi demonstrasi merek berupaya untuk mencari mobil tangki BBM untuk disandera dan digunakan sebagai panggung orasi, meskipun isunya itu tidak ada kaitannya dengan kenaikan harga BBM.

Ketika berhadapan dengan aparat keamanan, identitas kelompok mahasiswa mengalami kohesi dan ikatan yang kuat. Karena polisi menjadi kelompok *they* (liyan) ketika berhadapan dengan mahasiswa sebagai kelompok *we* (kami-nya). Seorang informan mengatakan:

Jadi begini contoh kejadian terakhir ya ketika mereka (pen: mahasiswa) berselisih, terus tawuran antara fakultas A melawan B, aparat masuk tiba-tiba...polisi represif, Bahkan aparat juga kadang terpancing karena aparat itu jika melakukan tindakan yang sangat represif maka mereka akan berhadapan dengan 2 fakultas itu. Jadi mereka yang awalnya musuh kemudian bersatu untuk melawan aparat.²¹

V.4.3 Mahasiswa Versus Masyarakat

Demonstrasi dengan aksi turun ke jalan dan membawa spanduk dan orasi merupakan upaya mahasiswa untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan

²⁰ Wawancara dengan Pak Ramli Dosen Sosiologi, UNHAS pada tanggal 20 Juli 2011 di Kampus UNHAS, pukul 10.00 WITA.

²¹ Wawancara dengan Wakil Rektor III UNM Prof Iman Suyitno

realitas politik kepada masyarakat, dengan harapan masyarakat juga bersimpati kepada isu tersebut dan melebur menjadi kekuatan massa yang besar, sehingga daya tekan atas tuntutan tersebut menjadi lebih kuat. Demonstrasi yang digelar di jalan oleh mahasiswa di Makassar, alih-alih mendapatkan simpati malah mendapatkan caci maki dari masyarakat, bahkan tidak jarang malah berakhir bentrok dengan masyarakat. Tentu fenomena ini sangat dilematis, di lain sisi mahasiswa turun aksi ke jalan adalah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, tetapi masyarakat sendiri sudah terganggu dengan aksi tersebut.

Menurut penemuan peneliti, strategi aksi demonstrasi yang digunakan oleh mahasiswa cenderung tidak simpatis. Aksi yang tidak simpatis ini biasanya berupa pemblokiran jalan, pembangkaran ban bekas, aksi sweeping kendaraan, dengan aksi-aksi tersebut sudah otomatis akan memacetka lalu-lintas di kota Makassar. Ruas jalan yang menjadi favorit mahasiswa untuk melancarkan aksi tutup jalan adalah jalan Sultan Alaudin. Jalan ini merupakan jalan protocol yang menghubungkan Makassar dengan kota lain di Sulawesi Selatan. Sehingga ketika jalan ini ditutup Makassar akan mengalami kemacetan yang parah, dan meluas di jalan-jalan penting lainnya.

Penutupan jalan tentu memiliki imbas negative yang bisa dirasakan masyarakat secara langsung. Kalangan masyarakat bawah yang secara langsung merasakan imbas ini adalah masyarakat yang menggantungkan rejekinya di jasa transportasi, seperti halnya sopir angkot maupun tukang becak.

V.5. Politik Kampus, Kepentingan Alumni, dan Elit Politik

Meskipun kehidupan kampus telah disterilkan dari politik melalui kebijakan NKK-BKK, tetapi kehidupan politik dan kehidupan mahasiswa seperti kutub magnet yang saling tarik menarik. Dari perspektif actor politik, kekuatan mahasiswa merupakan kekuatan sosial politik yang strategis untuk dijadikan sebagai kekuatan mobilisasi dukungan. Ini tidak terlepas peran gerakan mahasiswa dalam sejarah sosial politik Indonesia. Sedangkan dari perspektif mahasiswa, kehidupan politik secara normatif merupakan alat perjuangan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, sedangkan secara

pragmatis kehidupan politik dilihat mahasiswa sebagai instrument akselerasi untuk melakukan mobilitas vertikal. Mahasiswa juga merupakan aktor rasional yang memiliki kalkulasi untung rugi, sehingga dalam gerakan mahasiswa sendiri terdapat oknum mahasiswa yang memiliki orientasi pragmatis ketimbang orientasi normative.

Kalau alumni kan saya tangkap mereka punya jaringan jadi jaringan alumni dengan, Bahkan dalam kampus ini mereka punya kelompok-kelompok, kelompok yang terorganisir tapi sebenarnya kelompok itu bagus tapi ada kecenderungan yang tidak terputus mereka selalu merekrut, jadi misalnya saya sudah selesai saya sudah berangkat menjadi pegawai negeri di ini, ini, ini. Pada bulan tertentu ini, jadi mengapa saya bilang menjelang penerimaan mahasiswa baru ini kejadiannya, mereka kan libur, mereka kadang berkumpul dikampus jadi saya analisis mengapa kejadiannya kok pada saat penerimaan mahasiswa baru? Oh saya itung2 kan mereka libur mereka berkumpul dikampus reuni mereka itu, walaupun kejadiannya tidak, maka jaringannya tidak terputus katakanlah saya berangkat disini supaya saya punya faham setia maka saya masih nyumbang disana dengan kelompok saya yang ada didalam kampus ini dan ini untuk rokok, sehingga suatu saat ketika saya muncul dikampus, saya menjadi raja karena saya adalah menjadi donator disana meskipun kelompok didalamnya itu kelompok setia²².

Silang sengkabut permasalahan kekerasan yang ada dalam institusi pendidikan tinggi tidak terlepas dari lubang yang ada dalam kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan kita. Kekerasan yang ditemui oleh tim peneliti ketika turun ke lapangan beberapa diantaranya juga diakibatkan absennya kebijakan. Misalkan dalam kasus kekerasan aksi mahasiswa yang diakibatkan oleh perebutan jabatan maupun posisi organisasi kemahasiswaan, baik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) maupun Badan Legislatif Mahasiswa (BLM).

Memang telah ada kebijakan yang telah ditetapkan untuk mengatur organisasi mahasiswa, yakni Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia

²² Wawancara dengan Wakil Rektor III UNM Prof Iman Suyitno

Nomor 155/U/1998. KepMen 155/1998 ini mengatur tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi. Meskipun kepmen ini berikhtiar untuk mengatur organisasi kemahasiswaan, akan tetapi kepmen ini masih bersifat umum dan memiliki kecenderungan untuk memberikan kebebasan mahasiswa dari universitas asal untuk mengatur sendiri bentuk organisasi kemahasiswaannya. Terlihat dalam pasal 3, ayat 1 sampai 3: *(1) Di setiap perguruan tinggi terdapat satu organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi yang menaungi semua aktivitas kemahasiswaan. (2) Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi dibentuk pada tingkat perguruan tinggi, fakultas dan jurusan. (3) Bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan statuta perguruan tinggi yang bersangkutan.* Terlebih lagi kebebasan mahasiswa untuk menentukan bentuk organisasi kemahasiswaan beserta proses pembentukan maupun suksesi kepemimpinannya, dinaungi oleh pasal 2 dalam KepMen ini yang berbunyi; *Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa.*

Rumusan yang agak terang terdapat pada pasal 8 dan 9 yang berbunyi: *(8) Keanggotaan organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkat adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik. (9) Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan maksimal 1 (satu) tahun dan khusus untuk ketua umum tidak dapat dipilih kembali.* Namun pada pasal tersebut tidak menyentuh secara eksplisit poin-poin yang berkenaan dengan bagaimana mekanisme pemilihannya.

Dengan kebebasan mahasiswa untuk menginterpretasikan bentuk maupun mekanisme suksesi kepemimpinan ini yang kemudian hari menjadi cikal bakal terbentuknya BEM maupun BLM, baik di level Universitas maupun Fakultas. Interpretasi mahasiswa terhadap bentuk organisasi kemahasiswaan dengan mengkloning bentuk organisasi politik dalam system politik demokrasi beserta prinsip-prinsip demokrasinya. Beberapa prinsip demokrasi yang dirujuk mahasiswa untuk membentuk organisasi

kemahasiswaannya adalah prinsip pemisahan kekuasaan dan suksesi kepemimpinan melalui Pemilu. Dalam system politik demokratis, dikenal konsep pemisahan kekuasaan (*Separation of power*) antara Eksekutif (Presiden/perdana menteri), Legislatif (Dewan Perwakilan) dan yudikatif (lembaga peradilan). Prinsip pemisahan kekuasaan diafirmasi oleh mahasiswa dengan membentuk dua lembaga tinggi yang setara tetapi memiliki fungsi yang berbeda, yakni Badan Eksekutif Mahasiswa dengan Presiden BEM sebagai pemimpin tertingginya. Badan eksekutif mahasiswa ini layaknya lembaga eksekutif di level Negara, yakni lengkap dengan para menterinya. Ada menteri Minat dan bakat, menteri kesejahteraan mahasiswa, ada menteri social politik, dsb. Sedangkan Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) juga didudukan sebagai perwakilan dari mahasiswa sepertihalnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). BLM terdiri dari perwakilan jurusan-jurusan yang ada, serta perwakilan dari partai politik. Prinsip dalam system politik demokrasi yang kedua yang diaformasi oleh mahasiswa adalah prinsip suksesi kepemimpinan secara periodic melalui PEMILU. Jika kita mendengar kata Pemilu maka otomatis ada perangkat kepanitiaan pemilunya yakni KPU. Pemilu diinterpretasikan oleh mahasiswa sebagai Pemilihan Umum Raya Mahasiswa (Pemira) sedangkan perangkat kepanitiaannya disebut sebagai Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM). Seleksinya pun mengadopsi sistem rekrutmen yang ada di Negara yakni seleksi dan pemilihan KPUM dilakukan oleh Legislatif (BLM). Jika ada Pemilu maka ada peserta pemilu, yakni Partai Politik. Dalam Pemira Mahasiswa juga dikenal Partai politik. Peserta pemilu inilah yang berhak untuk mencalonkan anggotanya sebagai Presiden BEM maupun menjadi anggota BLM jika terpilih.

Proses demokratisasi dalam kehidupan kampus memang baik, terlebih lagi jika ditujukan untuk pendidikan politik, pembelajaran demokrasi untuk mencapai *democratic citizens*. Akan tetapi apabila mengafirmasi system politik demokrasi hanya parsial maka akan menimbulkan problematika dan tidak jarang menjadi konflik yang berujung kekerasan. Seperti dalam kasus kekerasan mahasiswa yang muncul karena Pemira Mahasiswa. Peneliti menemukan adanya kelembagaan yang timpang dalam organisasi mahasiswa, sehingga ketika muncul konflik mereka tidak memiliki badan atau organisasi

mahasiswa yang mampu melakukan resolusi konfliknya. Misalkan jika ada konflik seputar Pemilu Nasional maupun Pemilu Lokal (Pemilukada). Indonesia telah memiliki lembaga peradilan yang berwenang untuk melakukan resolusi dan menetapkan keputusan yang mengikat kedua pihak maupun lebih yang berkonflik. Sedangkan dalam organisasi mahasiswa seringkali terjadi konflik pada saat Pemira isunya pun berkebutuhan pada kecurangan pada pemilihan (coblosan) maupun pada saat penghitungan suara. Pada saat Pemira organisasi kemahasiswaan baik itu BEM maupun BLM dalam keadaan *Domisioner* (purna jabatan) sehingga kedua lembaga tersebut sudah tidak memiliki otoritas untuk mengeluarkan keputusan. Sehingga satu-satunya lembaga mahasiswa yang ada adalah KPUM. Semua permasalahan Pemira selesai pada keputusan KPUM, sehingga KPUM selain menjadi lembaga pelaksana Pemira, dia juga sebagai lembaga peradilan seputar Pemira. Pertanyaannya siap yang mengawasi KPUM, karena memang tidak menutup kemungkinan KPUM juga melakukan kecurangan. Ujung-ujungnya adalah adanya salah satu pihak yang tidak puas dengan keputusan KPUM, dan tidak ada mekanisme kelembagaan yang memfasilitasi ketidakpuasan ini. Sehingga *ending*-nya bisa ditebak, yakni aspirasi yang tidak tertampung akan berujung pada konflik dan kekerasan.

Pembagian kekuasaan yang berhenti pada BEM dan BLM saja tentu tidak sesuai dengan prinsip pembagian kekuasaan yang demokratis. Karena dalam system demokrasi baik eksekutif maupun legislative tidak boleh merangkap sebagai yudikatif. Maka harus ada lembaga yang setara dengan BEM maupun BLM, yang berfungsi sebagai lembaga resolusi konflik sekaligus melakukan *checks and balances*.

Meskipun Kementerian Pendidikan Nasional maupun Dirjen Pendidikan Tinggi tidak menetapkan bentuk organisasi kemahasiswaan, tetapi hamper bisa dipastikan bentuk organisasi kemahasiswaan di Indonesia telah mengadopsi bentuk BEM dan BLM seperti yang kami uraikan diatas. Argument kami didasarkan pada adanya asosiasi BEM Nusantara yang anggotanya terdiri dari BEM di level Universitas se-Indonesia, selain itu asosiasi BEM nasional di level fakultas, antara lain BEM FISIP, BEM FE, dll. Susunan

organisasinya pun hamper sama yakni terdiri dari BEM dan BLM dan suksesinya juga dengan mengadakan PEMIRA Mahasiswa.

Jika syarat untuk menjadi peserta Pemilu Mahasiswa adalah harus membuat Partai dan syarat membuat partai adalah memiliki anggota dengan tanda bukti Kartu Tanda Mahasiswa dengan jumlah tertentu, maka organisasi mahasiswa yang paling siap untuk ikut serta dalam Pemira ini adalah justru dari organisasi ekstra kampus. Karena organisasi ekstra kampus telah memiliki perangkat organisasi yang matang dan diwariskan secara turun temurun. Organisasi ekstra kampus juga memiliki system kaderisasi yang terstruktur dengan rapi sehingga proses rekrutmen dan kaderisasi dengan lancer mereka lakukan. Terlebih lagi organisasi ekstra kampus ini juga memiliki jaringan alumni yang kuat. Sehingga pendanaan yang berhubungan dengan aktifitas organisasi ekstra kampus bisa tercukupi. Fakta lapangan yang ditemukan oleh penulis menunjukkan hamper semua peserta PEMIRA itu terdiri dari organisasi ekstra kampus. Meskipun mereka tidak menggunakan logo organisasinya pada waktu mengikuti PEMIRA. Akan tetapi menurut pengakuan narasumber peneliti, bahwa partai peserta PEMIRA mahasiswa digawangi oleh aktivis-aktivis organisasi ekstra kampus. Dikarenakan selain infrastruktur organisasinya lebih mapan, mereka juga memiliki dukungan materiil dan politik dari para alumninya yang sedang menduduki jabatan politik. Sehingga alumni tersebut memiliki kepentingan untuk mensupport para “juniornya” untuk memenangkan kontestasi politik kampus. Karena gerakan mahasiswa sampai saat ini merupakan gerakan moral yang memiliki posisi strategis dalam kacamata actor politik. Gerakan mahasiswa sampai saat ini memiliki magnet yang besar untuk ditunggangi kepentingan elit politik melalui jejaring alumni organisasi ekstra kampus.

PEMIRA sebagai ajang demokrasi kampus, berubah menjadi ajang pesaingan politik *an sich* seperti yang dipraktikkan oleh partai politik Indonesia, maka sekaligus juga mengadopsi prinsip *zero sum game*²³. Tentu fakta lapangan ini menjadi ambivalen ketika kita tilik Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional

²³ *Zero-sum game* adalah permainan di mana satu pemain mendapatkan keuntungan dari kerugian pemain lainnya, Jadi selisih antara keuntungan di satu pihak dengan kerugian di pihak yang lain adalah 0.

Republik Indonesia Nomor : 26/Dikti/Kep/2002. Tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus Atau Partai Politik Dalam Kehidupan Kampus. Keputusan Dirjen Dikti ini menetapkan : *Melarang segala bentuk organisasi ekstra kampus dan Partai Politik membuka Sekretariat (Perwakilan) dan atau melakukan aktivitas politik praktis di kampus.*

Dalam masyarakat transisi selalu diwarnai dengan kontestasi elit politik, masyarakat transisi dalam konteks transisi elit, ditandai dengan tumbangnyanya elit lama dan muncul elit-elit baru. Begitu juga yang sedang terjadi di Indonesia, pasca tumbangnyanya Soeharto muncul figure-figur elit politik yang mencoba untuk melakukan reposisi kepemimpinan nasional, tidak terlepas yang terjadi di Sulawesi selatan khususnya di Makassar. Sebagai ibu kota propinsi dinamika politik di Makassar lebih tinggi dibandingkan dengan kota lainnya di Sulawesi Selatan. Elit politik di Makassar terus berusaha menanamkan pengaruhnya dan tidak sedikit muncul gesekan-gesekan. Seperti yang diungkapkan oleh Prof Armin kepada peneliti:

Ada juga demo dan anti demo, tapi kalau disini jumlahnya sedikit. Kasus demo dan anti demo itu biasanya melibatkan actor politik seperti saat pilkada, antara kelompok yang kalah dan kelompok yang menang, biasanya polisi ada di tengah-tengah. Biasanya kelompok yang kalah itu bersama-sama melawan kelompok yang menang. Tapi mahasiswa tidak pernah ada didalamnya. Mahasiswa ada didalamnya kalau dalam bentuk himpunan pelajar. Seperti calon bupati dari himpunan pelajar mahasiswa Bantai. Biasanya yang mempengaruhi mahasiswa adalah elit-elit yang punya hubungan dengan elit mahasiswa atau yang membiayai makan atau rapat-rapat. Jadi tidak terlihat. Seperti yang dikatakan bahwa hubungan antara elit dan kelompok penekan adalah hubungan yang tidak terlihat.²⁴

Pernyataan Prof Armin di atas juga dikuatkan oleh rekan-rekan aktivis mahasiswa dalam Focus Group Discussion:

Demonstrasi mahasiswa Makassar terlampau sering ditunggangi para politisi. Makassar sering jadi tempat pengalihan isu politik. Sudah bukan rahasia lagi kalau banyak aktivis yang tiba-tiba saja kaya mendadak, padahal kerjaannya hanya demo saja. Ini adalah simbiosis mutualisme

²⁴ Wawancara dengan Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si. Wakil Dekan 1 FISIP UNHAS pada tanggal 4 Mei 2011

antara mahasiswa dan politisi. Indikasinya juga nampak pada setiap kali ada demo yang kemudian rusuh, selalu bersamaan waktunya dengan peristiwa politik yang cukup besar, apakah itu pemilu, pilkada, atau momen politik penting. Beberapa tahun lalu, polisi sempat menyerbu kampus UMI dan berujung pada pencopotan Kapolda Sulsel Irjen Yusuf Manggabarani. Semua orang mengaitkan peristiwa itu dengan situasi politik Jakarta yang memanas. Demikian pula saat konflik Ambon. Tiba-tiba Makassar ikut rusuh. Sekarang, demo ini jelas punya kaitan dengan kasus Century yang mulai memanas. Jangan-jangan ini cuma pengalihan isu saja. Entahlah..²⁵

V.6. Prinsip Media *Bad News Is Good News* dan Kekerasan Mahasiswa

Mahasiswa faham betul pentingnya peran media dalam upaya mereka untuk mengangkat isu tertentu. Karena sebegitu apapun isunya atau sebanyak apapun massa peserta aksi demonstrasi, tanpa publikasi dari media isu yang diusung oleh mahasiswa tersebut tidak akan mendapatkan perhatian. Sesuai dengan prinsip media *there is nothing happen without publicity*. Sebuah peristiwa yang besar, tidak akan menjadi perbincangan khalayak banyak karena mereka tidak mengetahuinya, sehingga peristiwa besar tidak akan terdengar jika peristiwa tersebut tidak dipublikasikan. Pemahaman mereka terhadap prinsip media ini mempengaruhi struktur gerakannya. Dalam setiap aksi mahasiswa terdiri dari struktur aksi, yakni penanggung jawab aksi, coordinator lapangan (korlap), delegasi yang berperan untuk melakukan loby dan mediasi isu, aster atau penjaga kelompok, dan ada humas yang berkaitan dengan media. Sebelum melakukan aksi demonstrasi, humas aksi akan menghubungi media dengan harapan aksinya akan mendapatkan publikasi. Tetapi seringkali media juga memberikan masukan yang buruk perihal aksi mahasiswa. Seperti yang diungkapkan oleh aktivis mahasiswa dalam FGD:

Sebenarnya kita sering memakai strategi aksi damai, tapi masalahnya kalau kita memakai aksi damai media tidak mau meliput, pernah saya telpon saya kabarkan kalau kita mau aksi, mereka Tanya sudah berapa mobil terbakar?²⁶

Tentu ucapan jurnalis tersebut sangat provokatif, tetapi jika kita kaitkan dengan prinsip media *bad news is good news*, dalam artian berita yang bagus atau keadaan yang normal

²⁵ Pernyataan aktivis mahasiswa di FGD pada tanggal 21 Juli 2011, pukul 11.00 WITA.

²⁶ *ibid*

dan biasa saja, bagi media itu merupakan kondisi yang tidak bisa dikabarkan karena tidak memiliki *news values*, kebalikan dari itu berita buruk tentang pembunuhan, pemerkosaan, tawuran dsb, itu merupakan berita baik bagi media, karena berita tersebut memiliki *news values* sehingga layak untuk dipublikasi dan *marketable*.

Hubungan antara mahasiswa dan pers bisa dikatakan hubungan yang saling menggunakan, mahasiswa menggunakan pers sebagai corong isunya agar bisa didengar khalayak banyak atau bahkan didengar elit politik di Jakarta, begitupun dengan pers yang mendapatkan keuntungan secara langsung dari aksi-aksi kekerasan yang dilakukan mahasiswa dengan mendapatkan berita. Dalam FGD juga terungkap cerita dari pengakuan salah satu peserta FGD, dia menceritakan bahwa “sering aksi demo ditunda gara-gara menunggu wartawan”. Sementara bagi para jurnalis, aksi anarkis adalah lahan berita yang paling cepat tayang. Kata seorang jurnalis televisi, sekali berita kriminal ditayangkan, maka sang jurnalis menerima bayaran Rp 250 ribu. Di sini terjadi simbiosis mutualisme antara media dan mahasiswa tersebut. Para mahasiswa itu memahami watak para pengelola media yang memegang kalimat sakti “*Bad news is good news.*” Mereka menyajikan *good news* demi berita yang segera tayang di semua televisi.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Kekerasan Mahasiswa memiliki dua pola besar, Tipologi kekerasan mahasiswa yang pertama yang dimaknai seperti halnya peristiwa kekerasan pada umumnya (*just violence*), maka praktik kekerasan yang termasuk dalam tipologi ini adalah tawuran antar mahasiswa. Tipologi yang kedua, kekerasan aksi mahasiswa atau *unjust violence* merupakan praktik kekerasan mahasiswa yang memiliki semangat perjuangan yang normative didalamnya, sehingga dalam tipologi kedua ini selalu ada latarbelakang pbenar perjuangan, misalkan ideology, atau bahkan atas nama rakyat yang mereka perjuangkan. Kekerasan aksi mahasiswa ini seringkali mewarnai aksi demonstrasi mahasiswa. Demonstrasi yang pada dasarnya berangkat dari nilai-nilai perjuangan yang mulia, maupun semangat untuk meramaikan demokrasi malah berujung pada aksi kekerasan.

Pada kekerasan mahasiswa yang menjadi sumber referensi adalah identitas kolektif mahasiswa. Identitas kolektif ini berupa identitas jurusan, fakultas, dan fakultas, bahkan beberapa kasus identitas etnis dan kesukuan menjadi identitas kolektif yang menyatukan mereka. Identitas kolektif ini terbentuk melalui sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai kolektif dari senior kepada junior (mahasiswa baru). Sosialisasi dan internalisasi tersebut biasa dilakukan ketika acara penyambutan mahasiswa baru yang berupa OSPEK dilevel universitas dan fakultas, maupun Malam keakaraban di level Jurusan. Kegiatan ospek menjadi kegiatan yang ditujukan untuk menegaskan identitas “we”, sehingga target dari kegiatan tersebut adalah munculnya *in group feeling* yang kuat bahkan melahirkan fanatisme kelompok. Karena itu Ospek yang dilakukan tiap fakultas memiliki seremoni atau ritual yang berbeda-beda, tetapi memiliki pesan yang sama untuk disampaikan ke juniornya yakni mitos kebesaran fakultasnya dibanding fakultas yang lain. Pilihan identitas kelompok yang sangat kuat ini secara langsung mempertegas *we* dan *others*. Segregasi kelompok menjadi saham penting terjadinya kekerasan mahasiswa.

Segregasi ini pula yang mengakibatkan dengan mudahnya mahasiswa baik antar jurusan, fakultas, dan universitas untuk saling berhadap-hadapan. Hanya dengan *trigger* (pemicu) konflik yang kecil saja maka kekerasan mahasiswa akan pecah. Salah satu aktivitas mahasiswa untuk terus mereproduksi kekerasan kolektif adalah dengan mengadakan kegiatan seremonial yang tujuannya untuk memperkenalkan kepada adik-adik mahasiswa baru (junior) tentang sejarah kekerasan yang pernah dialami fakultasnya, senior dengan segala argumentasi pembenaran menegaskan kepada junior untuk mengemban tanggung jawab kehormatan fakultas. Tanggung jawab yang diartikan sebagai tindakan balas dendam maupun tindakan agresif lainnya. Seremoni tentang peristiwa kekerasan diperingati bukan untuk mengenang betapa buruknya peristiwa tersebut dan jangan sampai terjadi lagi, melainkan peringatan yang tiap tahun diselenggarakan tersebut malah untuk selalu *refresh* (menyegarkan) kembali memori kolektif tentang siapa musuh yang sebenarnya, atau ada dendam yang harus diselesaikan. Sehingga bisa disimpulkan justifikasi mahasiswa mampu melakukan kekerasan terhadap mahasiswa lain adalah justifikasi konstitutif berarti menempatkan kekerasan sebagai tindakan penegasan identitas mahasiswa. Mereka tidak mempersoalkan ada atau tidaknya saluran untuk menunjukkan eksistensi identitasnya, namun hanya dengan kekerasan identitas mereka menjadi ada.

Sumber referensi pada kekerasan aksi mahasiswa berkaitan dengan anggapan bahwa mahasiswa adalah *agents of changes* dan memiliki tanggung jawab social dan politik untuk mengawal kondisi Negara ini. Tentu referensi mereka adalah sejarah gerakan mahasiswa yang selalu mengiringi pergulatan kepemimpinan politik di Indonesia. Pertanyaannya kenapa mahasiswa menjadi poros perubahan? Keadaan ini bisa kita pahami melalui pendekatan transisional. Pada masyarakat transisi demokrasi belum terbangunnya *civil society* yang mapan. Kurang terbangunnya konsolidasi kelompok penekan berdasarkan kepentingan yang spesifik. Untuk mengisi kekosongan *civil society* ini maka mahasiswa yang keberadaannya merupakan elit intelektual yang dunianya dipenuhi dengan pengetahuan, keilmuan, buku-buku ataupun tradisi diskusi kritis yang secara sadar atau tidak mempengaruhi terhadap bangunan karakter (*character*

building) keterpanggilannya untuk melakukan perubahan sosial. Terjadinya kekerasan dalam aksi mahasiswa peneliti jelaskan dengan meminjam analisis Jurgen Habermas, demokrasi yang baik mensyaratkan adanya ruang public yang terbuka, serta dibangunnya saluran-saluran komunikasi multi stage holder untuk melakukan tindakan komunikatif (“*discourse*”) (Hardiman, 2009). Akan tetapi ruang public yang terbuka saja tidak cukup, Negara juga harus mampu melakukan aksi-aksi emansipatoris dengan memastikan semua masyarakat juga mampu mengakses ruang public tersebut, sehingga ruang public tidak didominasi oleh kalangan elite politik dan elite ekonomi semata. Ketersediaan ruang public tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengaksesnya akan berimplikasi pada frustrasi social. Ketika proses-proses politik telah didominasi oleh elite-elite yang terkurung oleh ambisi kekuasaan, demonstrasi menjadi sebuah alternatif untuk menyuarakan kehendak publik. Bagi rakyat yang termarjinalkan, tidak ada jalan lain untuk mengubah keadaan selain turun ke jalan dan berdemonstrasi.

Mahasiswa faham betul pentingnya peran media dalam upaya mereka untuk mengangkat isu tertentu. Karena sebagus apapun isunya atau sebanyak apapun massa peserta aksi demonstrasi, tanpa publikasi dari media isu yang diusung oleh mahasiswa tersebut tidak akan mendapatkan perhatian. Sesuai dengan prinsip media *there is nothing happen without publicity*. Sebuah peristiwa yang besar, tidak akan menjadi perbincangan khalayak banyak karena mereka tidak mengetahuinya, sehingga peristiwa besar tidak akan terdengar jika peristiwa tersebut tidak dipublikasikan. Hubungan antara mahasiswa bisa dikatakan hubungan yang saling menggunakan, mahasiswa menggunakan pers sebagai corong isunya agar bisa didengar khalayak banyak atau bahkan didengar elit politik di Jakarta, begitupun dengan pers yang mendapatkan keuntungan secara langsung dari aksi-aksi kekerasan yang dilakukan mahasiswa. Di sini terjadi simbiosis mutualisme antara media dan mahasiswa tersebut. Para mahasiswa itu memahami watak para pengelola media yang memegang kalimat sakti “*Bad news is good news*”. Sampai pada titik ini kekerasan dalam aksi mahasiswa digunakan untuk mendramatisasi tuntutan mahasiswa sekaligus gerakan aksi dari mahasiswa itu sendiri. Dalam upayanya untuk mendapatkan ekspos media, mahasiswa menggunakan tindak kekerasan dalam aksinya.

Singkatnya kekerasan dijadikan sebagai justifikasi *Instrumental*, berarti menjadikan kekerasan sebagai alat untuk mencapai tujuan/kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arent, Hannah. (1969). *On Violence*. Harvest Books New York: Harcourt, Brace and World.
- Ashutosh Varshney, Rizal Panggabean, Mohammad Zulfan Tadjoeeddin. (2004) "Patterns of Collective Violence in Indonesia, 1990-2003, Working paper series (United Nations Support Facility for Indonesian Recovery).
- Camara, Helder (1970). *Spiral Of Violence*, Sheed and Ward Stagbooks.
- Creswell, John W, (2002). "*Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches (Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif)*", terj: Angkatan III & IV KIK-UI dan bekerja sama dengan Nur Khabibah, Kata Pengantar: Parsudi Suparlan, Jakarta: Penerbit KIK Press.
- Eller, David. (2006). *Violence and Culture: A Cross-Cultural and Interdisciplinary Approach*. Thomson and Wadsworth.
- Gover, Angela R *et.al* (2008). "The Relationship between Violence in the Family of Origin and Dating Violence Among College Students," *Journal of International Violence*, 23 (12): 1667-1692.
- Hiebert, Paul (1983). *Cultural Anthropology*, Grand Rapids. 183-184.
- Keane, John. (2004) *Violence and Democracy*. Cambridge University Press.
- Laclau, E. (1991). "Community and Its Paradoxes: Richard Rorty's "Liberal Utopia"" i M. T. Collective. *Community at Loose Ends*. Minneapolis, University of Minnesota Press
- Moore, Linda Watson (1998). "Leadership Theory and Student Violence: Is There a Relationship?" *NASSP Bulletin*, 82: 50-55
- Ozbay, Orden dan Onur Koksoy (2009). "Is Low Self-Control Associated with Violence Among Youths in Turkey?," *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 53 (2): 145-167.
- Rich, John Martin (1981). "School Violence: Four Theories Explain Why it Happens," *NASSP Bulletin*, 65: 64-71.
- Schmidt and Schroder (2001). *Anthropology of Violence and Conflict*. Routledge.